



PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca Covid 19

2024

**Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan
Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca Covid 19**

Bintang Aulia Lutfi
Phuong Le Ha
Victoria Fanggidae
Pham Van Long



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2024

Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca Covid 19

Referensi Pengutipan:

Perkumpulan PRAKARSA. (2024). Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca Covid 19. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Penulis:

Bintang Aulia Lutfi, Phuong Le Ha, Victoria Fanggidae, Pham Van

Peneliti:

Eka Afrina Djamhari, Farhan Medio Yudantyo, Samira Hanim, Long Hoang, Nguyen Duc Thanh

Desain dan Tata Letak:

Bambang Nurjaman, Suhendra

Penerbit:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, Indonesia

Kata Kunci:

ASEAN, pendidikan, insentif, peraturan perundang-undangan, kesejahteraan sosial, ketidakadilan

Disclaimer:

Laporan ini didasarkan pada penelitian berjudul "Studi tentang Kecenderungan Belanja Pemerintah dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca COVID-19". Isi laporan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini ditulis oleh Bintang Aulia Lutfi, Phuong Le Ha, Victoria Fanggidae, Pham Van Long. Tulisan ini adalah bagian dari seri yang ditulis untuk menginformasikan debat publik mengenai isu-isu pembangunan dan kebijakan kemanusiaan.

Publikasi ini mempunyai hak cipta, namun teksnya boleh digunakan secara cuma-cuma untuk keperluan advokasi, kampanye, pendidikan, dan penelitian, dengan syarat sumbernya disebutkan secara lengkap. Pemegang hak cipta meminta agar semua penggunaan tersebut didaftarkan pada mereka untuk tujuan penilaian dampak. Untuk menyalin dalam keadaan lain, atau untuk digunakan kembali dalam publikasi lain, atau untuk penerjemahan atau adaptasi, izin harus diperoleh, dan mungkin dikenakan biaya. Silahkan kirimkan email: perkumpulan@theprakarsa.org

Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Case Box	vii
Kata Pengantar	viii
Ringkasan Eksekutif	x
01 Pendahuluan	1
02 Pengeluaran Publik Untuk Pendidikan di Negara-Negara ASEAN	3
2.1. Latar belakang sosial ekonomi dan sistem pendidikan kawasan ASEAN	3
2.2. Pengeluaran publik untuk pendidikan	5
2.3. Pengeluaran pendidikan untuk individu	11
2.4. Respons terhadap COVID-19	13
03 Privatisasi Pendidikan di Negara-negara ASEAN	17
04 Dampak Terhadap Ketimpangan dan Pertumbuhan Inklusif	31
05 Pencapaian dan Tantangan: Pendidikan di ASEAN	39
5.1. Pencapaian pendidikan di negara-negara ASEAN	39
5.2. Tantangan dalam memobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pendidikan	41
06 Simpulan dan Rekomendasi	43
6.1. Simpulan	43
6.2. Rekomendasi	45
Daftar Pustaka	48

Daftar Gambar

Gambar 1:	Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB di ASEAN, 2013 - 2022 (%)	5
Gambar 2:	Perubahan belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB, 2013 - 2022 (%)	6
Gambar 3:	Perubahan belanja pendidikan terhadap total belanja pemerintah di negara-negara ASEAN, 2013 - 2022 (% Belanja Pemerintah)	7
Gambar 4:	Persentase belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap total belanja pemerintah di negara-negara ASEAN, 2013 - 2022 (%)	8
Gambar 5:	Proporsi belanja pendidikan untuk belanja rutin vs belanja modal di negara negara ASEAN, tersedia terakhir tahun 2013 - 2021 (%)	10
Gambar 6:	Total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan per siswa di negara-negara ASEAN, 2013 - 2021 (USD)	11
Gambar 7:	Persentase pengeluaran publik per pelajar dalam PDB per kapita menurut tingkat di negara-negara ASEAN, tersedia tahun terbaru 2013 - 2018 (%)	12
Gambar 8:	Gaji guru sebagai persentase dari total pengeluaran pendidikan di lembaga-lembaga publik di negara-negara ASEAN, tersedia terakhir tahun 2014-2021 (%)	13
Gambar 9:	Perubahan poin persentase belanja pendidikan sebagai persentase belanja publik di ASEAN pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dibandingkan tahun 2019 (periode sebelum COVID-19) (%)	14
Gambar 10:	Persentase pendaftaran sekolah swasta di negara-negara ASEAN, 2013 - 2021 (%)	20
Gambar 11:	Struktur Kementerian berdasarkan tanggung jawab lembaga pendidikan	22
Gambar 12:	Anggaran Pendidikan Indonesia (2015 - 2024) (Triliun Rupiah)	23
Gambar 13:	Proporsi anggaran pendidikan tersebar di beberapa kementerian dan transfer ke daerah (2024)	24
Gambar 14:	Jumlah Siswa di Sekolah Antar Kementerian (Negeri dan Swasta)	24
Gambar 15:	Madrasah Swasta Islam di Desa Mandalamukti, Bandung Barat yang mempunyai fasilitas kurang memadai	27
Gambar 16:	Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 4 Bandar Lampung memiliki jumlah siswa yang terbatas.	27

Gambar 17: Skor dan peringkat CRII untuk negara-negara ASEAN, 2022	31
Gambar 18: Tingkat kelulusan sekolah dasar di negara-negara ASEAN, tersedia terbaru pada tahun 2017 – 2020 (%)	33
Gambar 19: Nilai PISA bidang matematika, membaca, dan sains di negara-negara ASEAN, 2018-2022	39
Gambar 20: Peringkat HDI (Human Development Index) di negara-negara ASEAN, 2022	40
Gambar 21: Perkiraan lama pendidikan dan rata-rata lama sekolah di negara-negara ASEAN, 2022	41

Daftar Tabel

Tabel 1: Tinjauan umum negara-negara anggota ASEAN, 2022	4
Tabel 2: Struktur sektor pendidikan dan jumlah tahun pendidikan dasar di negara-negara ASEAN, 2024	4
Tabel 3: Jumlah dan persentase ASEAN yang mengikuti rekomendasi pengeluaran UNESCO sebelum (2013-2019) dan setelah (2020-2022) pandemi COVID-19.	9
Tabel 4: Kebijakan pendidikan negara-negara ASEAN dalam menanggapi pandemi COVID-19	14
Tabel 5: Insentif investasi hanya untuk pendidikan swasta di negara-negara ASEAN, 2023	18
Tabel 6: Jumlah sekolah swasta di beberapa negara ASEAN, tersedia tahun (2013 – 2022)	19
Tabel 7: Membandingkan nilai ujian nasional (UNBK dan UNKP) sekolah negeri dan swasta di Indonesia, 2019 (%)	25
Tabel 8: Pengeluaran pendidikan dalam total pendapatan Indonesia, 2021 dan Vietnam (di Hanoi), 2023	28
Tabel 9: Skor CRII untuk belanja anggaran pendidikan negara-negara ASEAN, 2022	32
Tabel 10: Indeks Paritas Gender (GPI) partisipasi sekolah di sekolah dasar, 2013 – 2021	34
Tabel 11: Kelompok strategi terpilih untuk menyamakan akses terhadap peluang pendidikan di negara-negara ASEAN	36

Daftar Case Box

<i>Case box 1:</i> Pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia	22
<i>Case box 2:</i> Sekolah Swasta Kelas Ekonomi Menengah-Rendah di Indonesia	27
<i>Case box 3:</i> Beban pengeluaran untuk pendidikan di Vietnam	29



Kata Pengantar

Pasca pandemi COVID-19, kita menghadapi krisis geopolitik di beberapa kawasan di dunia yang berdampak langsung pada perekonomian. Saat ini banyak negara yang mengalami inflasi dan tantangan dalam keberlanjutan fiskal. Meskipun ketahanan fiskal dan perekonomian negara-negara ASEAN cukup baik dibandingkan kawasan lain, ASEAN tetap perlu memperkuat kolaborasi ekonomi untuk menghadapi tantangan global.

Penanaman Modal Asing (FDI) di ASEAN menghadapi tantangan, terutama dengan munculnya fenomena *“race to the bottom”* (berlomba ke bawah). Tema Keketuaan ASEAN Laos 2024 adalah *“Meningkatkan Konektivitas dan Ketahanan,”* yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menghubungkan perekonomian negara-negara anggota. ASEAN berupaya menjadi kawasan dengan vitalitas ekonomi tinggi yang menarik bagi investor asing. Melalui *“Enhancing Connectivity”* (Meningkatkan Konektivitas), ASEAN juga memprioritaskan peran anak dalam transformasi perilaku melalui pendidikan. Kami percaya bahwa pendidikan yang dibiayai negara merupakan elemen penting dari keadilan fiskal karena dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang dan memberikan kesempatan yang lebih setara bagi masyarakat.

Riset PRAKARSA bertajuk *“Studi Tentang Kecenderungan Belanja Publik dan Privatisasi Pendidikan di Negara-Negara ASEAN Pasca COVID-19”* yang Anda baca saat ini merupakan bukti penguatan kebijakan peningkatan kualitas belanja publik. Penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian sebelumnya mengenai *“Kajian Kebijakan Insentif Penanaman Modal Asing di Negara Anggota ASEAN 2021-2023”*.

Kami percaya bahwa ASEAN harus mencegah praktik *“race to the bottom”* untuk insentif fiskal dan non-fiskal di negara-negara ASEAN, karena hal ini akan semakin mengurangi alokasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ketahanan fiskal negara-negara ASEAN juga diperlukan untuk menghadapi bonus demografi di kawasan ASEAN di masa depan, sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah di negara-negara ASEAN dengan fokus pada pengelolaan dan alokasi belanja publik di bidang pendidikan, mengidentifikasi tren dan perkembangan privatisasi sektor pendidikan, dan mengevaluasi kemajuan kesetaraan pendidikan di seluruh kawasan ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji upaya mobilisasi sumber daya dalam negeri untuk mendukung tujuan



pembangunan nasional, sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan dan berkembang di negara-negara ASEAN.

Kami berharap penelitian ini tidak berhenti sampai di sini. Kami berharap pemerintah negara-negara ASEAN menindaklanjuti rekomendasi kami, seperti memastikan dikembangkannya kebijakan yang lebih kuat untuk menjamin dan memenuhi kesejahteraan banyak orang. Kami mendorong belanja di sektor pendidikan menjadi lebih aman, tidak hanya memperbaiki kebijakan dari sudut pandang ekonomi tetapi juga memastikan kualitas sehingga ASEAN dapat mencapai SDGs.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti PRAKARSA di Indonesia dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini dari negara-negara ASEAN lainnya, terutama rekan peneliti kami dari Vietnam. Kami berharap laporan ini dapat memperkaya pengetahuan yang ada dan memberikan dorongan kepada para pengambil kebijakan untuk berkomitmen penuh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, Juni 2024

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif PRAKARSA

A person with a backpack is seen from behind, looking at a large map of Southeast Asia. The map shows countries like Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, and Cambodia. The person is wearing a blue jacket and a backpack. The background is a blurred street scene.

Ringkasan Eksekutif

Pendidikan yang dibiayai negara merupakan elemen kunci dalam keadilan fiskal. Hal ini merupakan barang publik yang penting yang dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang dan memberikan kesempatan yang lebih setara kepada masyarakat. Laporan ini mengkaji dampak strategi keuangan terhadap pendidikan di negara-negara ASEAN setelah pandemi COVID-19, dengan fokus utama pada belanja pemerintah dan tren privatisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah ASEAN dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1) Bagaimana belanja publik di bidang pendidikan dikelola dan dialokasikan di berbagai negara ASEAN?, 2) Apa tren dan perkembangan privatisasi sektor pendidikan di negara-negara ASEAN? dan 3) Bagaimana kemajuan kesetaraan pendidikan ditangani dan dicapai di seluruh kawasan ASEAN? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian akan terjawab dalam penelitian ini. Kami menggunakan pendekatan kualitatif, yang mencakup tinjauan ekstensif terhadap literatur dan data. Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan fiskal ini mempengaruhi pemerataan pendidikan dan mobilisasi sumber daya dalam negeri.

Analisis kami menunjukkan bahwa terdapat perubahan finansial yang signifikan dalam sektor pendidikan di negara-negara ASEAN. Pengeluaran untuk pendidikan sebagai persentase terhadap PDB dan pengeluaran publik di 8 dari 10 negara ASEAN telah menurun, bahkan sebelum adanya COVID-19. Pengurangan pendanaan publik ini berbeda-beda di setiap negara, mencerminkan situasi ekonomi dan prioritas pemerintah yang berbeda-beda. Penurunan pendanaan ini memprihatinkan karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan ketersediaan sumber daya di sekolah negeri. Dari tahun 2020 hingga 2022, terdapat sedikit pemulihan pada porsi belanja pemerintah untuk pendidikan di Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Filipina. Namun, belanja tidak kembali ke

tingkat tahun 2013. Malaysia menduduki posisi teratas pada tahun 2013, sedangkan Filipina memimpin pada tahun 2022.

Hanya Malaysia yang memenuhi ambang batas yang direkomendasikan UNESCO sebesar 4% dari PDB ketika membandingkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan. Meskipun lebih dari separuh negara-negara ASEAN telah mencapai total rekomendasi belanja publik minimum UNESCO, beberapa negara, termasuk Vietnam dan Indonesia, gagal memenuhi standar ini.

Dalam hal struktur belanja pemerintah, sebagian besar belanja pemerintah di bidang pendidikan diarahkan pada belanja rutin. Namun, keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal bervariasi antar wilayah. Negara-negara kecil mengalokasikan lebih banyak proporsi belanja modal, sedangkan negara-negara berpendapatan tinggi membelanjakan belanja modal relatif lebih sedikit. Gaji guru menyumbang sebagian besar pengeluaran rutin di sebagian besar negara. Namun, prioritas guru di setiap negara berbeda-beda.

Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, sebagian besar pemerintah mengurangi anggaran pendidikan mereka untuk merealokasi dana untuk tindakan mendesak seperti layanan kesehatan atau pertumbuhan ekonomi. Namun, Malaysia dan Indonesia merupakan pengecualian terhadap tren ini. Namun, meskipun Malaysia secara konsisten meningkatkan belanja pendidikannya selama tiga tahun, Indonesia hanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan pada tahun 2020. Setelah itu, belanjanya turun di bawah tingkat sebelum pandemi. Di antara negara-negara lain, Singapura mengalami penurunan belanja pendidikan paling signifikan sejak awal pandemi.

Selain menurunnya pendanaan publik, terjadi pula peningkatan privatisasi di sektor pendidikan. Lebih banyak investasi swasta dilakukan untuk mengisi kesenjangan yang disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran pemerintah. Meskipun hal ini memberikan lebih banyak peluang pendidikan, hal ini juga menimbulkan tantangan yang signifikan. Permasalahan yang paling mendesak adalah meningkatnya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, dimana pendidikan berkualitas semakin hanya tersedia bagi mereka yang mampu.

Belanja pemerintah dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap pendidikan. Semua negara ASEAN termasuk dalam kelompok terbawah Indeks Komitmen Mengurangi Ketimpangan (CRII-*Reducing Inequality Index* (Mengurangi Indeks Ketimpangan)). Secara khusus, dalam hal cakupan pendidikan menurut CRII, Myanmar, Kamboja, dan Laos – tiga negara ASEAN yang paling tidak berkembang – termasuk yang terendah secara global. Sebaliknya, Singapura, Malaysia, dan Filipina mendapat nilai tertinggi pada indikator ini. Meskipun kesenjangan akses terhadap pendidikan antar gender, lokasi, dan tingkat kekayaan semakin mengecil, kesenjangan masih terjadi di antara kelompok masyarakat termiskin, khususnya di Laos dan Indonesia. Khususnya, Indonesia memiliki persentase

institusi pendidikan swasta tertinggi, dan Laos menunjukkan tingkat pertumbuhan sekolah swasta paling signifikan.

Terlepas dari tantangan finansial ini, beberapa negara ASEAN telah berhasil mempertahankan atau bahkan meningkatkan standar pendidikan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh evaluasi internasional seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*-Program Penilaian Siswa Internasional). Sebagian besar negara, kecuali Singapura, masih mendapat skor lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*-Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi). Namun, skor di semua kategori di beberapa negara mengalami peningkatan. Untuk skor HDI (*Human Development Index*-Indeks Pembangunan Manusia), meskipun Singapura dan Brunei termasuk negara dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi, negara-negara ASEAN lainnya memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di bawah rata-rata regional ASEAN. Meskipun demikian, skor HDI suatu negara cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah masih dapat mempertahankan kualitas pendidikan yang tinggi meskipun terdapat kendala keuangan.

Namun, pencapaian pendidikan yang lebih tinggi dan akses yang lebih setara terhadap peluang pendidikan memerlukan peningkatan investasi pendidikan. Sayangnya, mobilisasi sumber daya domestik untuk pendidikan di negara-negara ASEAN menghadapi beberapa tantangan: rendahnya progresivitas pajak, kendala ekonomi, terbatasnya dukungan kebijakan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.

Mengingat tantangan-tantangan tersebut di atas, dalam penelitian ini terdapat dua rekomendasi prioritas kepada sekretariat ASEAN dan negara-negara ASEAN, yaitu: 1) Pemerintah negara-negara ASEAN harus memfokuskan anggarannya pada sektor pendidikan. Hal ini dapat direalokasikan dari anggaran mitigasi COVID yang kini sudah mulai pulih, dan 2) negara-negara ASEAN memerlukan standar pelaporan data pendidikan yang seragam. Standar ini akan memfasilitasi pemantauan dan penilaian terhadap komitmen dan alokasi anggaran masing-masing negara pada sektor pendidikan.



01 Pendahuluan



Sehubungan dengan penelitian paralel kami mengenai kebijakan insentif ASEAN untuk investasi asing 2021-2023. Studi mengenai belanja publik dan privatisasi untuk pendidikan ini berkontribusi pada pemahaman holistik tentang lanskap fiskal yang terus berkembang di kawasan ini. Melalui temuan kami, kami bercita-cita untuk mengadvokasi strategi yang memprioritaskan mobilisasi sumber daya dalam negeri untuk mendukung layanan publik yang penting, khususnya pendidikan.

Pendidikan universal gratis adalah hak asasi manusia mendasar yang penting bagi kesejahteraan, hak pilihan, dan kesejahteraan individu. Pada tahun 2015, 193 negara anggota dengan suara bulat mengadopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk Tujuan 4 tentang “menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua” (UNDESA, 2020).

Pandemi Covid-19 telah memperburuk krisis pembelajaran. Hampir setiap negara berpendapatan rendah telah menutup sekolahnya selama dua tahun terakhir. Sekitar 23,8 juta anak dan remaja mungkin putus sekolah karena kurangnya akses sekolah dan/atau penurunan pendapatan keluarga (UNESCO, 2020). Sebagian besar negara telah membuka sekolah sepenuhnya, namun 46 negara hanya membuka enam sekolah secara parsial, dan banyak negara yang masih menutup sekolah sepenuhnya (UNICEF, 2022). Banyak negara dengan hasil pembelajaran yang buruk sebelum pandemi juga cenderung melakukan penutupan sekolah lebih lama dan hal ini memperburuk kesenjangan. Penutupan sekolah dan kurangnya akses terhadap dukungan pembelajaran (kontak guru) dan materi selama COVID-19 berdampak buruk pada tingkat pembelajaran di seluruh dunia.

Di banyak negara, pendidikan tidak diprioritaskan dalam anggaran dan rencana pemerintah. Menurut laporan *Education Finance Watch* (EFW) tahun 2021, dua pertiga negara



berpendapatan rendah dan menengah ke bawah dilaporkan telah memotong anggaran pendidikan publik mereka sejak awal pandemi ini (Bank Dunia, 2021). Data UNESCO menunjukkan bahwa negara-negara telah melakukan investasi sebesar 16 triliun USD, dengan 97% dari investasi ini terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi sementara hanya 2,9% yang dibelanjakan di negara-negara berpenghasilan rendah (UNESCO, 2021). Belanja investasi yang tidak merata dapat memperburuk tantangan yang ada di bidang pendidikan dalam hal akses, inklusi, kesetaraan, dan kualitas. Meningkatkan porsi, ukuran, sensitivitas, dan pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan melalui perencanaan dan alokasi sumber daya yang komprehensif, serta pemanfaatan anggaran yang tepat, merupakan hal yang sangat penting untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi serta dapat menjangkau dan mengatasi permasalahan yang ada. kebutuhan belajar peserta didik dari kelompok paling marginal.

Sebagai fasilitas publik yang penting yang dapat meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang, dan pada saat yang sama memberikan kesempatan yang lebih setara kepada masyarakat, pendidikan yang didanai negara merupakan elemen penting dalam keadilan fiskal. Namun, karena keterbatasan pendapatan negara selama dan setelah pandemi COVID-19, pemerintah negara-negara anggota ASEAN mungkin mengalihkan sebagian belanja pendidikannya ke publik melalui program pendidikan yang diprivatisasi atau semi-privatisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena tersebut lebih dekat dengan pendekatan berbasis dokumen jika terdapat tren dalam kebijakan pemerintah ASEAN.

- Bagaimana belanja publik di bidang pendidikan dikelola dan dialokasikan di berbagai negara ASEAN?
- Apa saja tren dan perkembangan privatisasi sektor pendidikan di negara-negara ASEAN?
- Bagaimana kemajuan kesetaraan pendidikan ditangani dan dicapai di kawasan ASEAN?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur: laporan keuangan, portal data, dan dokumen pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder. Dengan fokus pada kebijakan belanja publik di bidang pendidikan di negara-negara ASEAN, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut direspon selama dan setelah pandemi. Analisis ini dilakukan untuk memahami dampak kebijakan terhadap sektor pendidikan, bagaimana negara-negara tersebut menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan adaptasi kebijakan yang dilakukan untuk memastikan kelanjutan pendidikan di tengah krisis. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini namun juga memberikan wawasan mengenai efektivitas dan efisiensi belanja publik dalam merespons kebutuhan pendidikan pada masa krisis kesehatan di ASEAN.



02 Pengeluaran Publik Untuk Pendidikan di Negara-Negara ASEAN



2.1. Latar belakang sosial ekonomi dan sistem pendidikan kawasan ASEAN

Terdapat beragam perekonomian di antara 10 negara ASEAN ini dalam hal indikator sosial-ekonomi mulai dari jumlah penduduk hingga pembangunan ekonomi.

Singapura dan Brunei, meskipun memiliki populasi terkecil di kawasan ini, memiliki pendapatan per kapita tertinggi (Tabel 1). Khususnya, kedua negara ini termasuk negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia, yaitu lebih dari US\$55.000. Sebaliknya, negara-negara anggota ASEAN lainnya mencatat PDB per kapita yang lebih rendah, biasanya turun di bawah US\$30.000 pada tahun 2022. Di antara delapan negara lainnya, populasinya sangat bervariasi, dengan Malaysia, Laos, dan Kamboja berjumlah lebih kecil dari 34 juta pada tahun 2022. Sedangkan lima negara lainnya di atas 54 juta jiwa adalah Indonesia dengan jumlah penduduk 275,5 juta jiwa. Persentase populasi perempuan di negara-negara ASEAN relatif seragam, mulai dari yang terendah sebesar 47,70% di Singapura hingga tertinggi sebesar 51,45% di Thailand.

Terdapat sedikit perbedaan antar anggota ASEAN dalam hal tingkat partisipasi angkatan kerja. Singapura dan Kamboja memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi, masing-masing sebesar 78,64% dan 79,02%. Sebaliknya, Filipina dan Laos memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih rendah, yakni di bawah 62%.

Tabel 1: Tinjauan umum negara-negara anggota ASEAN, 2022

Negara	Populasi (Juta)	Perempuan, populasi (% Populasi)	Angka partisipasi tenaga kerja (% Populasi)	PDB (konstan 2015, miliar USD)	PDB, PKP (konstan 2017, miliar USD)	PDB per kapita, PKP (konstan 2017, Rp)
Brunei	0.45	48.28	68.2	13	26.34	58,669.9
Kamboja	16.77	50.5	79.02	24.95	75.97	4,530.53
Indonesia	275.5	49.65	68.21	1,122.29	3,418.91	12,409.76
Laos	7.53	49.6	61.38	19.57	59.84	7,947.66
Malaysia	33.94	48.9	69.46	385.94	960.97	28,315.37
Myanmar	54.18	50.23	64.37	73	223.46	4,124.49
Filipina	115.56	49.22	59.01	407.69	991.72	8,581.94
Singapura	5.64	47.7	78.64	379.71	609	108,036.1
Thailand	71.7	51.45	75.48	450.13	1,255.21	17,507.12
Vietnam	98.19	50.6	77.96	358.92	1,118.99	11,396.53

Sumber: Indikator Pembangunan Dunia dari Bank Dunia

Catatan: Data angkatan kerja dari Myanmar untuk tahun 2020, negara lain untuk tahun 2021.

Di sebagian besar negara ASEAN, usia masuk sekolah dasar dilaporkan pada usia enam tahun, kecuali di Myanmar (5 tahun) dan Indonesia (7 tahun). Di kawasan ini, sebagian besar negara mengikuti struktur pendidikan dasar 12 tahun, yang terbagi menjadi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas (lihat Tabel 2). Struktur sektor pendidikan secara rinci berbeda-beda di antara anggota ASEAN, dengan struktur 6+3+3 yang paling umum di kawasan ini.

Tabel 2: Struktur sektor pendidikan dan jumlah tahun pendidikan dasar di negara-negara ASEAN, 2024

Struktur	Jumlah Tahun	Negara
6+3+3	12	Kamboja, Indonesia, Thailand
5+4+3	12	Laos, Vietnam
6+4+2	12	Filipina, Singapura



7+5	12	Brunei*
6+3+2	11	Malaysia
5+4+2	11	Myanmar

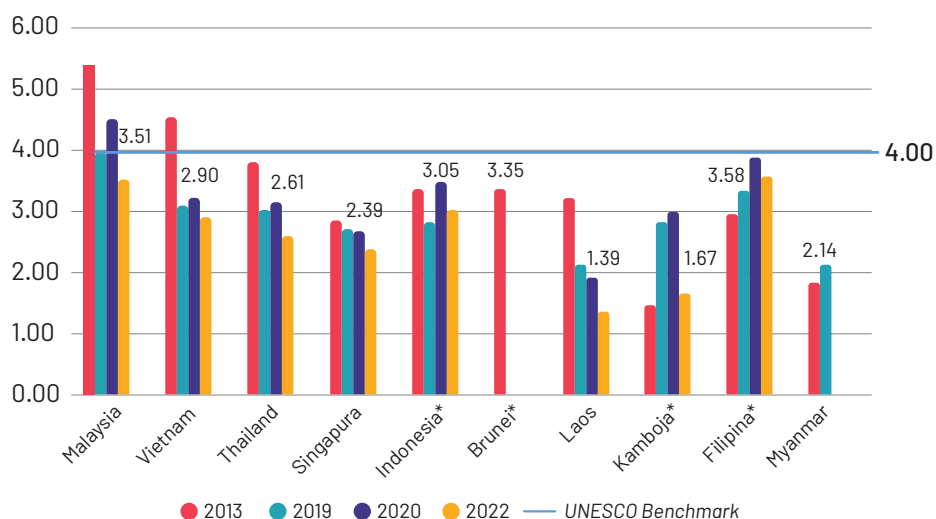
Sumber: Tinjauan penulis terhadap dokumen hukum negara-negara ASEAN

Catatan: * Pendidikan dasar Brunei terdiri dari 7 tahun pendidikan dasar, termasuk 1 tahun pra-sekolah.

2.2 Pengeluaran publik untuk pendidikan

Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi pada sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengarah pada inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum dan kebijakan negara-negara ASEAN secara konsisten menegaskan pentingnya pembangunan pendidikan. Misalnya, konstitusi Vietnam tahun 2013 menyatakan bahwa pembangunan pendidikan merupakan kebijakan nasional utama untuk meningkatkan standar intelektual masyarakat, melatih sumber daya manusia, dan mengembangkan bakat. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan merupakan cerminan komitmen pemerintah terhadap kemajuan pendidikan. Dengan mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk sektor ini, pemerintah menunjukkan prioritas pendidikan dalam agenda nasionalnya.

Gambar 1: Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB di ASEAN, 2013 - 2022 (%)



Sumber: Statistik Pendidikan Bank Dunia

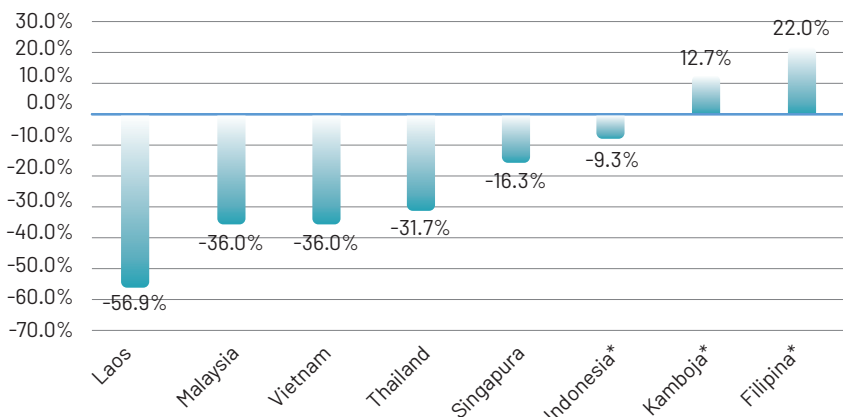
Catatan: * Karena keterbatasan ketersediaan data, data persentase untuk Brunei dan Filipina pada tahun 2013 mencerminkan data tahun 2014. Demikian pula data untuk Kamboja dan Indonesia pada tahun 2022 mencerminkan data tahun 2021.

Meskipun terdapat tren penurunan secara keseluruhan dalam persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB di negara-negara ASEAN dari tahun 2013 hingga 2022, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Kamboja, dan Filipina mengalami sedikit pemulihan pada tahun 2020 (Lihat gambar 1). Namun, belanja di sebagian besar negara tidak kembali ke tingkat tahun 2013. Malaysia, yang awalnya merupakan negara dengan pembelanjaan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 5,48%, mengalami penurunan yang stabil menjadi 3,98% pada tahun 2019 dan selanjutnya menjadi 3,51% pada tahun 2022.

Filipina secara konsisten meningkatkan belanja pendidikannya dari 2,93% pada tahun 2014 menjadi 3,53% pada tahun 2022, yang menunjukkan prioritas strategis terhadap pendidikan bahkan selama pandemi. Malaysia menduduki posisi teratas pada tahun 2013, sementara pada tahun 2022, Filipina muncul sebagai negara dengan pembelanja terbesar. Singapura menunjukkan varians terendah sepanjang periode tersebut, dengan penurunan minimal dari 2,85% pada tahun 2013 menjadi 2,39% pada tahun 2022. Kamboja dan Laos secara konsisten memiliki belanja pendidikan terhadap PDB yang sangat rendah, sehingga dapat menghambat mereka dalam mencapai tujuan akademis mereka. Kamboja mengalokasikan sebagian kecil PDBnya untuk pendidikan, dengan pengeluaran meningkat dari 1,48% pada tahun 2013 menjadi 2,83% pada tahun 2019, mencapai puncaknya sebesar 3,00% pada tahun 2020, dan kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1,67% pada tahun 2021. Di sisi lain, Laos menurunkan pengeluaran PDB untuk pendidikan secara signifikan, menguranginya dari 3,23% pada tahun 2013 menjadi 1,39% pada tahun 2022.

Selain itu, dari tahun 2013 hingga 2022, belanja publik negara-negara ASEAN di bidang pendidikan menunjukkan pola yang berbeda, yang menunjukkan adanya variasi dalam prioritas dan investasi masing-masing negara di bidang pendidikan.

Gambar 2: Perubahan belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB, 2013 – 2022 (%)

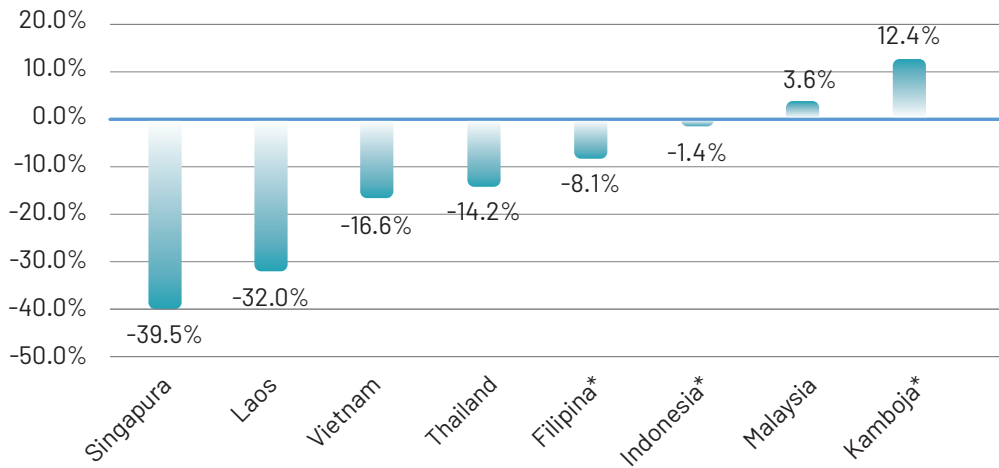


Sumber: Statistik Pendidikan Bank Dunia, UNESCO.

Catatan: *Karena keterbatasan ketersediaan data, data persentase Filipina pada tahun 2013 mencerminkan data tahun 2014. Demikian pula data untuk Kamboja dan Indonesia pada tahun 2022 mencerminkan data tahun 2021.

Mengenai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase terhadap PDB, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di sebagian besar negara cenderung menurun, kecuali di Kamboja dan Filipina (Gambar 2). Negara-negara dengan peningkatan belanja terbesar dalam persentase terhadap PDB adalah Filipina (22%), diikuti oleh Kamboja (12,7%). Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi di Laos (56,9%) dan Malaysia (36%).

Gambar 3: Perubahan belanja pendidikan terhadap total belanja pemerintah di negara-negara ASEAN, 2013 – 2022 (% Belanja Pemerintah)

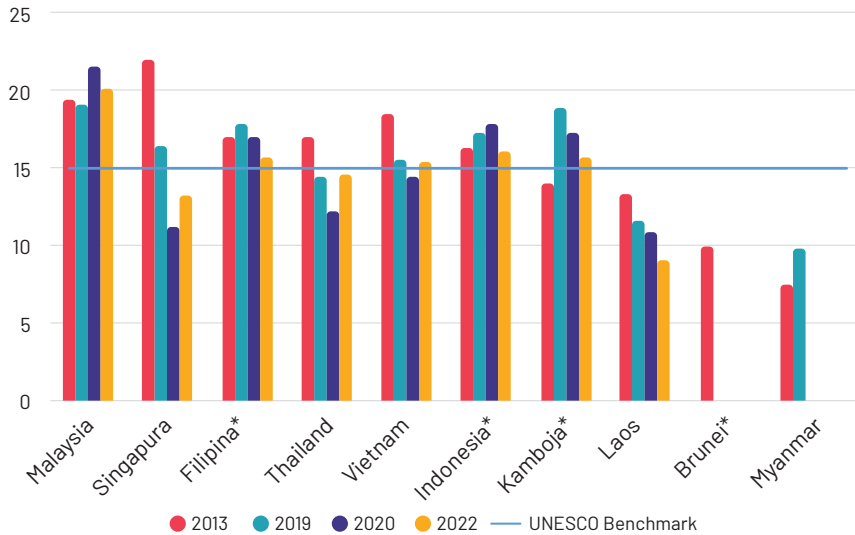


Sumber: Statistik Pendidikan Bank Dunia, UNESCO.

Catatan: *Karena keterbatasan ketersediaan data, data persentase untuk Filipina pada tahun 2013 mencerminkan data dari tahun 2014. Demikian pula, data untuk Kamboja dan Indonesia pada tahun 2022 mencerminkan data dari tahun 2021.

Seperti terlihat pada Gambar 3, dari tahun 2013 – 2022, tren belanja pendidikan sebagai persentase dari total belanja pemerintah juga mengalami penurunan. Negara dengan peningkatan persentase total pengeluaran paling signifikan sejauh ini adalah Kamboja (12,4%) dan Malaysia (3,6%). Di sisi lain, Singapura dan Laos mengalami penurunan belanja pendidikan yang paling signifikan dalam persentase terhadap PDB. Menariknya, selama periode survei, pemerintah Malaysia menurunkan persentase PDB yang dibelanjakan untuk pendidikan. Namun, persentase belanja pemerintah terhadap total belanja negara meningkat, hal ini menunjukkan adanya kemungkinan belanja pendidikan diprioritaskan dalam anggaran pemerintah. Alternatifnya, hal ini mungkin disebabkan oleh total belanja publik Malaysia yang bertumbuh lebih cepat dibandingkan PDB-nya. Sebaliknya, Filipina meningkatkan belanja pendidikan sebagai persentase terhadap PDB, namun mengalami penurunan persentase belanja pendidikan terhadap belanja pemerintah.

Gambar 4: Persentase belanja pemerintah bidang pendidikan terhadap total belanja pemerintah di negara-negara ASEAN, 2013 - 2022 (%)



Sumber: Statistik Pendidikan Bank Dunia, UNESCO.

Catatan: *Karena keterbatasan ketersediaan data, data persentase untuk Brunei dan Filipina pada tahun 2013 mencerminkan data dari tahun 2014. Demikian pula, data untuk Kamboja dan Indonesia pada tahun 2022 mencerminkan data dari tahun 2021.

Persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai bagian dari total pengeluaran pemerintah di Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Laos berfluktuasi sepanjang periode tersebut (Gambar 4). Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, Malaysia secara konsisten membelanjakan persentase anggarannya untuk pendidikan lebih tinggi dibandingkan anggota ASEAN lainnya. Negara ini merupakan negara dengan pembelanjaan tertinggi kedua yaitu sebesar 19,5% pada tahun 2013, dan sejak tahun 2019, negara ini telah melampaui Singapura sebagai negara dengan pembelanjaan tertinggi dan mempertahankan posisi ini. Di sisi lain, Laos mengalami penurunan belanja pendidikan yang signifikan, turun dari 13,3% menjadi 9,1% pada periode tersebut. Kamboja mengalami peningkatan belanja pendidikan yang luar biasa, meningkat dari 14,0% pada tahun 2013 ke puncaknya sebesar 18,9% pada tahun 2019 sebelum menurun menjadi 15,7% pada tahun 2021.

Membandingkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan ambang batas yang direkomendasikan UNESCO sebesar 4% dari PDB (gambar 2), pada 2013, Malaysia dan Vietnam melampaui standar UNESCO, sementara negara-negara lain gagal mencapainya. Pada tahun 2019, semua negara lain, kecuali Malaysia, gagal memenuhi tingkat pedoman tersebut. Sejak wabah COVID-19, persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap PDB hampir seluruh negara ASEAN berada jauh di bawah rekomendasi sebesar 4%.

Gambar 4 juga membandingkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase total pengeluaran pemerintah negara-negara ASEAN terhadap ambang batas yang direkomendasikan UNESCO sebesar 15%. Sebagian besar negara pada awalnya memenuhi atau melampaui tolok ukur ini, namun beberapa negara mengalami penurunan, kemungkinan karena dampak finansial dari pandemi ini. Pada tahun 2013, negara-negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Singapura melampaui patokan tersebut. Namun, Laos, Kamboja, Brunei, dan Myanmar berada di bawah level yang direkomendasikan. Enam tahun kemudian, Kamboja mengalami peningkatan yang mengesankan dalam belanja pendidikan, melampaui standar yang ditetapkan. Pada saat yang sama, Vietnam mengalami penurunan namun tetap di atas 15%. Pada tahun 2020, yang ditandai dengan pandemi COVID-19, Malaysia mencapai puncak pengeluarannya dibandingkan dengan ambang batas, melampaui negara-negara lain. Memasuki tahun 2022, terdapat penurunan yang nyata di sebagian besar negara, dimana Laos mengalami penurunan lebih lanjut, dengan investasi pendidikan turun secara signifikan di bawah tingkat yang direkomendasikan yaitu sebesar 9,1%.

Tabel 3: Jumlah dan persentase ASEAN yang mengikuti rekomendasi pengeluaran UNESCO sebelum (2013-2019) dan setelah (2020-2022) pandemi COVID-19.

	Pengeluaran PDB minimum yang direkomendasikan		Pengeluaran publik minimum yang direkomendasikan		Dalam kedua rekomendasi tersebut	
	Sebelum (2013 - 2019)	Sesudah (2020 - 2022)	Sebelum (2013 - 2019)	Sesudah (2020 - 2022)	Sebelum (2013 - 2019)	Sesudah (2020 - 2022)
No.	1	1	7	5	1	1
%	10%	10%	70%	50%	10%	10%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan dari Statistik Pendidikan Bank Dunia.

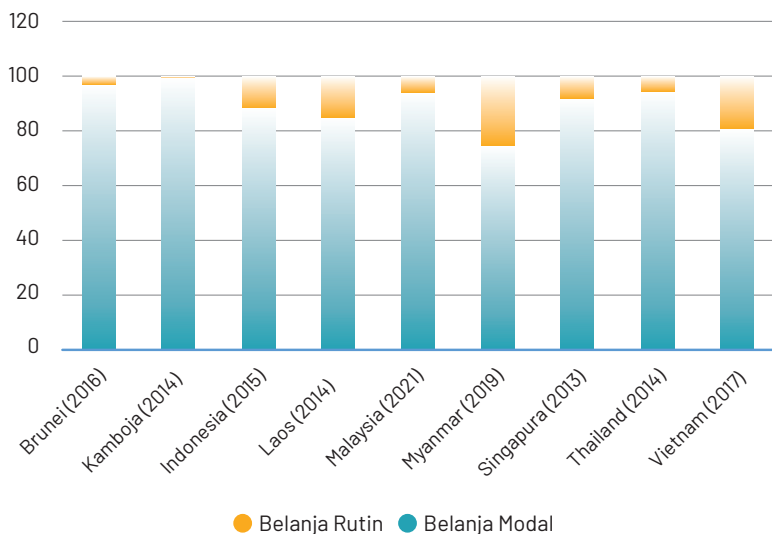
Berdasarkan data yang tersedia selama dua periode, hanya 10% negara ASEAN dengan data yang tersedia (1 negara - Malaysia) yang memenuhi patokan PDB minimum UNESCO (Lihat Tabel 1). Sedangkan angka rekomendasi belanja pemerintah sebelum pandemi COVID-19 sebesar 70%. Angka tersebut menurun dua pertiga hingga 50% selama dan setelah periode pandemi. Hanya sepersepuluh anggota ASEAN yang memenuhi kedua tolok ukur tersebut sepanjang periode 2013-2022.

Meskipun beberapa negara pada umumnya memenuhi standar internasional, namun mereka gagal mencapai standar negaranya sendiri. Misalnya, Undang-Undang Pendidikan Vietnam tahun 2019 mengatur bahwa Negara harus memastikan bahwa pengeluaran pendidikan dan pelatihan menghabiskan setidaknya 20% anggaran Negara. Namun, rata-rata porsi belanja pemerintah untuk pendidikan di Vietnam antara tahun 2013 dan 2022 hanya sekitar



16%. Sementara itu, Undang-Undang Pendidikan Laos tahun 2015 menyatakan bahwa Negara memprioritaskan dan meningkatkan rasio pengeluaran anggaran nasional untuk pendidikan, mencapai peningkatan 18%. Namun, belanja pendidikan sebenarnya di Laos belum mencapai tingkat tersebut. Untuk kasus Indonesia, konstitusi mengamanatkan alokasi 20% belanja pemerintah untuk pendidikan sejak tahun 2009. Data Kementerian Keuangan tahun 2024 menunjukkan Indonesia mengalokasikan Rp665 triliun (sekitar 20%) dari total belanja negara sebesar Rp3,304 triliun. Namun, data Bank Dunia pada tahun 2013-2021 menunjukkan gambaran yang berbeda, dengan persentase yang hampir mencapai 20% dan hanya mencapai sekitar 16% pada tahun 2022. Negara-negara ini tidak mencapai target nasional mereka, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan alokasi sumber daya aktual di negara tersebut pada sektor pendidikan.

Gambar 5: Proporsi belanja pendidikan untuk belanja rutin vs belanja modal di negara-negara ASEAN, tersedia terakhir tahun 2013 – 2021 (%)



Sumber data: UIS.Stat., dan Vu Sy Cuong (2020)

Di ASEAN, Malaysia meningkatkan proporsi belanjanya rutinnya dari 90,5% pada tahun 2013 menjadi 94,4% pada tahun 2021. Sementara itu, Vietnam menghabiskan persentase belanjanya publiknya yang stabil untuk belanja rutin, yaitu sekitar 81%. Data yang terbatas menunjukkan tren yang beragam di negara-negara lain. Pola belanja rutin dan belanja modal berbeda-beda di setiap wilayah. Negara-negara kecil seperti Myanmar, Laos, dan Vietnam mengalokasikan belanja modal yang jauh lebih tinggi, yang menunjukkan adanya kebutuhan yang lebih besar terhadap infrastruktur seperti ruang kelas dan perbaikan sekolah. Di sisi lain, negara-negara berpendapatan tinggi seperti Brunei dan Thailand menunjukkan belanja modal yang kecil, yang menunjukkan rendahnya permintaan pembiayaan infrastruktur. Pengecualiannya adalah Kamboja, yang meskipun merupakan salah satu negara dengan

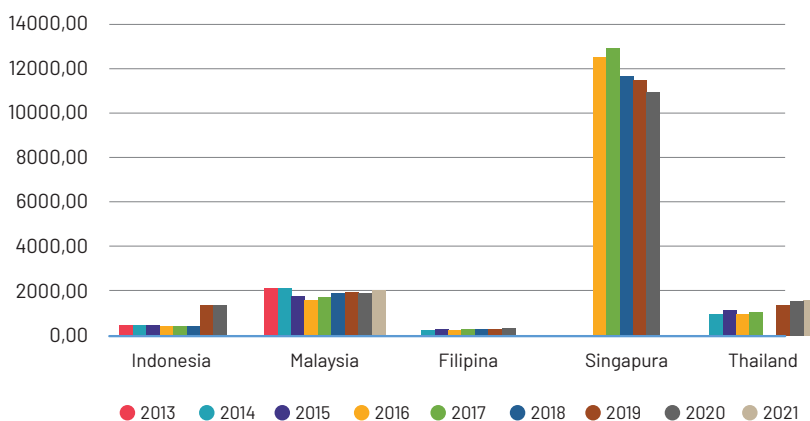


pendapatan terendah di kawasan ini, mencatat persentase pengeluaran saat ini yang sangat tinggi, mencapai 100% pada tahun 2013 dan menurun sebesar 99,5% pada tahun 2014.

2.3. Pengeluaran pendidikan untuk individu

Total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan per siswa di negara-negara ASEAN bervariasi antara tahun 2013 dan 2021 (Gambar 6). Singapura terbukti menjadi negara yang paling banyak berinvestasi dalam pendidikan per kapita, dengan rata-rata US\$11.895,17 per siswa selama periode tersebut meskipun terjadi tren penurunan di tahun-tahun berikutnya. Malaysia mengikuti dari jarak jauh dengan rata-rata US\$1.933,69 per siswa. Data Malaysia menunjukkan fluktuasi yang signifikan, termasuk titik awal yang tinggi pada tahun 2013, penurunan pada tahun 2016, pemulihan berikutnya, dan puncaknya pada tahun 2021. Thailand dan Indonesia menempati kisaran menengah, masing-masing dengan rata-rata US\$1.248,84 dan US\$705,28 per siswa. Meskipun data Thailand menunjukkan investasi per siswa relatif stabil dari waktu ke waktu, pengeluaran Indonesia berfluktuasi. Negara terakhir ini mengalami sedikit tren penurunan dari tahun 2013 hingga 2018, diikuti dengan lonjakan pada tahun 2019. Meskipun memulai dengan angka terendah, Filipina secara konsisten meningkatkan pengeluaran per siswa sepanjang periode tersebut, yang menggambarkan komitmen yang kuat untuk semakin meningkatkan pendanaan pendidikan. Negara ini menghabiskan rata-rata US\$311,67 per siswa.

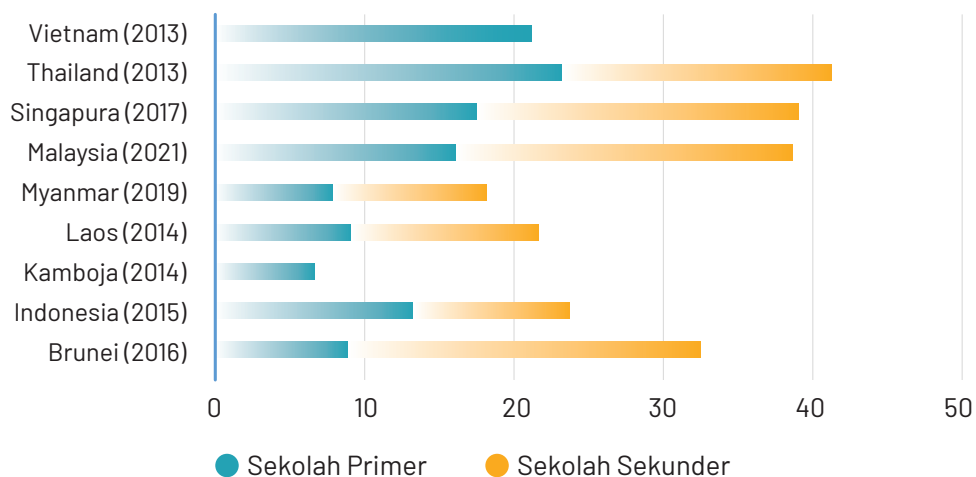
Gambar 6: Total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan per siswa di negara-negara ASEAN, 2013 – 2021 (USD)



Sumber data: Daya Saing Dunia IMF

Belanja pendidikan per siswa, yang diukur dengan PDB per kapita, juga menunjukkan pola yang berbeda antar tingkat pendidikan dan negara (Gambar 7).

Gambar 7: Persentase pengeluaran publik per pelajar dalam PDB per kapita menurut tingkat di negara-negara ASEAN, tersedia tahun terbaru 2013 – 2018 (%)



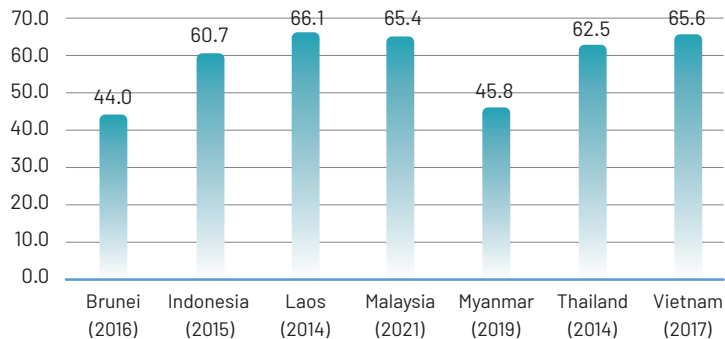
Sumber data: Statistik Pendidikan Bank Dunia Data

Catatan: Tidak ada data tersedia untuk pendidikan menengah di Vietnam dan Kamboja

Terkait tingkat pendidikan, Thailand dan Indonesia memprioritaskan pengeluaran untuk pelajar sekolah dasar, masing-masing mengalokasikan 23,3% dan 13,2% PDB per kapita. Sebagai perbandingan, siswa sekolah menengah menerima masing-masing 18% dan 10,5% PDB per kapita. Sebaliknya, negara-negara lain menghabiskan lebih banyak uang untuk siswa sekolah menengah dibandingkan siswa sekolah dasar. Kesenjangan pendanaan terbesar terjadi di Brunei, dimana siswa sekolah menengah menerima lebih dari dua kali lipat jumlah yang diinvestasikan pada siswa sekolah dasar (23,6% untuk siswa sekolah menengah dan 8,9% untuk sekolah dasar).

Di antara negara-negara yang memiliki data yang tersedia, siswa sekolah dasar di Thailand dan Vietnam menerima persentase belanja pemerintah per siswa tertinggi dalam PDB per kapita, sedangkan siswa di Kamboja menerima persentase belanja negara per siswa terendah. Untuk siswa sekolah menengah, Brunei dan Malaysia mengalokasikan proporsi belanja pemerintah per siswa tertinggi (diukur dari PDB per kapita), masing-masing sebesar 23,6% dan 22,6%.

Gambar 8: Gaji guru sebagai persentase dari total pengeluaran pendidikan di lembaga-lembaga publik di negara-negara ASEAN, tersedia terakhir tahun 2014–2021 (%)



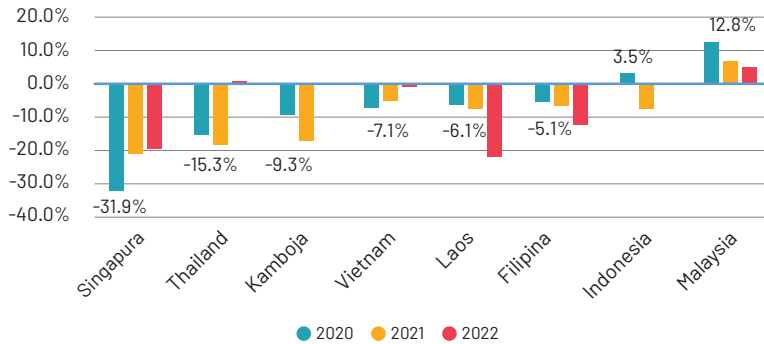
Sumber data: UIS.Stat., dan Vu Sy Cuong (2020)

Tujuh negara ASEAN mempublikasikan data kompensasi (gaji) staf pengajar. Data terakhir yang tersedia pada tahun 2014 hingga 2020 (lihat Gambar 8) menunjukkan bahwa persentase belanja pendidikan untuk gaji guru berkisar antara 44% hingga 66%. Angka tertinggi terjadi di Laos, salah satu negara terbelakang di ASEAN. Di sisi lain, Brunei, negara dengan pendapatan tertinggi di antara negara-negara tersebut, membelanjakan proporsi belanja pendidikan paling sedikit untuk tenaga pengajarnya. Menariknya, negara ini menghabiskan proporsi yang sama untuk gaji guru seperti Myanmar – negara dengan PDB per kapita terendah di anggota ASEAN pada tahun 2022 (sebesar 45,8%).

2.4. Respons terhadap COVID-19

Pengeluaran terkait COVID-19 untuk pendidikan sebagai proporsi pengeluaran publik di negara-negara ASEAN, dengan data yang tersedia untuk tahun 2020, 2021, dan 2022, ditunjukkan pada Gambar 9. Berdasarkan data yang tersedia, sebagian besar pemerintah menerapkan strategi pengurangan anggaran untuk merealokasi dana untuk keperluan pendidikan. tindakan mendesak dalam menanggapi wabah COVID-19, dengan pengecualian seperti Malaysia dan Indonesia. Namun, meskipun Malaysia secara konsisten meningkatkan belanja pendidikannya selama tiga tahun, Indonesia hanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan pada tahun 2020. Setelah itu, belanjanya turun di bawah tingkat sebelum pandemi. Persentase perubahan terbesar terjadi di Singapura, yang mengurangi pengeluaran pendidikannya sebesar lebih dari 30% pada awal pandemi.

Gambar 9: Perubahan poin persentase belanja pendidikan sebagai persentase belanja publik di ASEAN pada tahun 2020, 2021, dan 2022 dibandingkan tahun 2019 (periode sebelum COVID-19)(%).



Sumber: Statistik Pendidikan, 2023

Negara-negara ASEAN memberlakukan berbagai kebijakan pendidikan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Kebijakan dan intervensi relatif beragam di kawasan ASEAN; namun, dukungan tersebut dapat dibagi menjadi lima kelompok utama: dukungan keuangan, dukungan sanitasi, dukungan kesehatan dan gizi, dukungan materi dan teknologi, dan dukungan *e-learning* (lihat Tabel 4). Kebijakan tambahan, terutama dukungan teknologi yang diterapkan selama pandemi, diharapkan menjadi solusi sementara terhadap penutupan sekolah dan pengganti kebijakan pendidikan yang ada seiring dengan semakin populernya *e-learning* dan pembelajaran dari rumah.

Tabel 4: Kebijakan pendidikan negara-negara ASEAN dalam menanggapi pandemi COVID-19

Kategori	Negara	Kebijakan
Dukungan Finansial	Indonesia, Vietnam	Bantuan tambahan tunjangan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan
	Malaysia	Tawarkan keringanan pajak atas tabungan bersih
		Membantu siswa di lembaga tahfiz dan sekolah singkat
	Thailand, Vietnam	Dukungan biaya kuliah untuk siswa
	Vietnam	Membebaskan, mengurangi, dan memperpanjang waktu pelunasan pajak tahun 2019 dan pembebasan pajak yang timbul pada kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020 bagi lembaga pendidikan.

Dukungan Kesehatan dan Nutrisi	Indonesia	Asisten Bantuan Medis COVID-19 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
	Singapura	Memberikan subsidi untuk makanan yang dibeli dari kantin sekolah dan dikonsumsi di sekolah
		Vaksinasi siswa
Laos	Menyiapkan hotline untuk kesehatan mental dan dukungan psikososial	
Dukungan Sanitasi	Laos, Myanmar	Sediakan masker wajah, pelindung wajah, termometer, dan tempat cuci tangan tambahan secara gratis
	Laos, Thailand, Vietnam	Support for cleaning, disinfection, and sanitation in all educational institutions
Dukungan Materi dan Teknologi	Kamboja, Indonesia	Koneksi internet gratis untuk mendukung pembelajaran jarak jauh
	Laos, Filipina	Mencetak dan mendistribusikan buku pelajaran pendidikan, bahan pembelajaran dan panduan guru
	Laos	Menyediakan peralatan konferensi video, akun Microsoft Teams, dan lisensi Zoom
	Malaysia, Singapura, Vietnam	Pinjaman laptop atau tablet, perangkat yang mendukung Internet kepada siswa
	Malaysia	Meningkatkan, memperbaiki infrastruktur dan peralatan yang usang untuk memastikan konektivitas internet
Dukungan E-Learning	Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Vietnam	Mendukung Kegiatan Belajar di Rumah dengan bekerja sama dengan radio, saluran televisi, dan jejaring sosial
	Singapura	Melaksanakan pembelajaran berbasis rumah (<i>HBL-Home Based Learning</i>) satu hari per minggu sebelum pemutusan sirkuit untuk mempersiapkan kemungkinan HBL penuh waktu
	Kamboja, Filipina, Singapura, Vietnam	Memberikan bimbingan, pelatihan tentang perencanaan, desain, dan pembuatan sumber daya <i>e-learning</i> , memicu kreativitas dan kolaborasi antar guru

	Kamboja, Laos, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam	Menerapkan <i>e-learning</i> di masa pandemi
Lain-lain	Thailand	Mengirim guru dalam kunjungan rumah tangga pribadi (biaya bahan bakar dan tunjangan guru ditanggung oleh pemerintah)

Sumber: Review dan klasifikasi penulis, berdasarkan Dabrowski et al., (2022); Lao PDR MoES et al. (2021); MoEYS (2020); Vandeweyer et al. (2021); Keputusan 09/2022/QD-TTg; Keputusan 24/2022/QD-TTg



03 Privatisasi Pendidikan di Negara-negara ASEAN



Sektor swasta dapat terlibat dalam pendidikan dengan berbagai cara, seperti sekolah swasta berbiaya penuh, sekolah yang dikelola swasta dan disponsori publik (seperti program voucher), sekolah komunitas, pendanaan swasta (sumbangan dan biaya) untuk sekolah negeri, dan bimbingan belajar privat (UNESCO Bangkok, 2014). Meskipun sebagian besar pendidikan dasar di negara-negara ASEAN diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik, sektor swasta—termasuk masyarakat dan keluarga—sangat penting di banyak negara.

Di ASEAN, pemerintah telah mengakui kontribusi sektor swasta dalam memenuhi permintaan pendidikan dan berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan operator dan investor sambil memastikan infrastruktur dan standar layanan yang tinggi. Misalnya, Konstitusi Vietnam menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan investasi dan menarik sumber pendanaan sektor pendidikan lainnya. Pemerintah Vietnam mengeluarkan Resolusi No. 35/NQ-CP 2019 tentang peningkatan sumber daya sosial untuk investasi pembangunan pendidikan tahun 2019-2025. Undang-Undang Pendidikan Kamboja juga menyatakan bahwa Negara harus sangat mendorong dan mendukung lembaga-lembaga swasta dalam membangun kemitraan yang menyediakan semua jenis layanan pendidikan di semua tingkatan.



Tabel 5: Insentif investasi hanya untuk pendidikan swasta di negara-negara ASEAN, 2023

	PPB Standar	Tingkat Preferensial PPB untuk Lembaga Pendidikan?	Insentif lainnya
Kamboja	20%	Tidak	Pembebasan pajak dari tahun 2024 hingga 2028
Indonesia	22%	Tidak	Pajak Super Pengurangan merupakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi.
Laos	20%	Tidak	Pengurangan tarif pajak keuntungan sebesar 5% khusus untuk pusat pelatihan dan penelitian
Malaysia	24%	Tidak	Pengurangan Pajak untuk Sponsor Mesin Penjual Otomatis Terbalik Berbasis Kecerdasan Buatan Pintar (<i>AI-Artificial Intelligence</i>). Pasal 34(6)(h) Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1967 menawarkan pengurangan pajak kepada individu dan badan yang terlibat dalam proyek komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat, yang mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan.
Filipina	25%	10%	<ul style="list-style-type: none"> Institusi pendidikan nonsaham dan nirlaba tidak dikenakan pajak. Instansi pendidikan pemerintah tidak dikenakan pajak.
Vietnam	20%	10%	Pembebasan pajak selama empat tahun, pengurangan pajak sebesar 50% yang terutang pada tahun berikutnya atas penghasilan badan usaha dari pelaksanaan proyek penanaman modal baru di bidang sosialisasi di daerah yang

			tidak termasuk dalam daftar daerah dengan kondisi sosial ekonomi sulit yang tercantum dalam lampiran yang dikeluarkan dengan Keputusan 218/2013/ND-CP.
--	--	--	--

Sumber: Tinjauan penulis terhadap dokumen hukum negara-negara ASEAN

Institusi pendidikan swasta dianggap sebagai bisnis. Tabel 5 membandingkan tarif CIT standar dengan tarif CIT dengan tingkat preferensi tertinggi untuk institusi pendidikan di negara-negara ASEAN. Di sebagian besar negara ASEAN, dunia usaha harus memenuhi persyaratan tertentu, bergantung pada peraturan di masing-masing negara, untuk menikmati insentif berbasis keuntungan (VEPR et al., 2020). Namun, dua negara—Vietnam dan Filipina—menawarkan tarif pajak preferensial yang paling menarik bagi perusahaan swasta, yang dihasilkan dari investasi di bidang pendidikan tanpa persyaratan khusus lainnya. Di Vietnam, sekolah swasta dapat menikmati tarif pajak preferensial sebesar 10% selama masa operasionalnya. Selain itu, di Filipina, institusi pendidikan yang bersifat nirlaba harus membayar pajak sebesar 10% atas penghasilan kena pajak mereka. Negara lain, termasuk Kamboja, Indonesia, Laos, dan Malaysia, menerapkan insentif pajak lain, seperti pembebasan pajak dan pengurangan pajak.

Tabel 6: Jumlah sekolah swasta di beberapa negara ASEAN, tersedia tahun (2013 – 2022)

		Jumlah Sekolah Swasta	Persentase sekolah swasta dari total sekolah
Kamboja	2019	999	9.44
	2020	970	9.16
Indonesia	2019	15,461	40.1
Laos	2016	82	4.9
	2022	129	7
Malaysia	2013	132,541	2.69
	2021	136,200	2.98
Filipina	2016	21,988	29.1
	2020	21,764	27.8
Thailand	2013	4,011	11.48
	2021	3,989	11.92

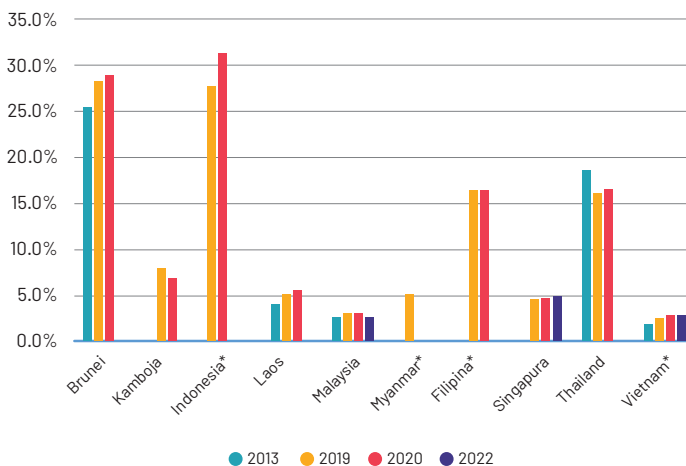
Vietnam	2014	586	2.03
	2021	719	2.74

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku statistik tahunan Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam; Statistik & Indikator Pendidikan Swasta Kamboja; dan UIS.Stat.

Catatan: Sekolah menengah atas di Laos menyediakan pendidikan di tingkat bawah dan atas.

Tabel 6 menunjukkan jumlah dan persentase sekolah swasta dibandingkan dengan total sekolah di semua tingkat pendidikan—sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas—di negara-negara ASEAN tertentu selama tahun yang berbeda. Meskipun Kamboja dan Filipina mengalami penurunan persentase sekolah swasta, Laos, Malaysia, dan Vietnam mengalami peningkatan. Menariknya, negara-negara terakhir ini juga menunjukkan tren penurunan belanja publik di bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya potensi hubungan terbalik antara prevalensi sekolah swasta dan investasi pendidikan pemerintah. Meskipun tingkat CIT menarik bagi investor pendidikan, Vietnam memiliki persentase institusi swasta terendah di kawasan. Indonesia dan Filipina saat ini memiliki persentase sekolah swasta tertinggi, yaitu 40% (pada tahun 2019) dan 27,8% (pada tahun 2021). Sementara itu, Laos mengalami pertumbuhan tercepat, dengan persentase sekolah swasta dalam total sekolah melonjak dari 4,9% pada tahun 2016 menjadi 7% pada tahun 2022. Data penting terlihat di Thailand: ketika jumlah sekolah swasta menurun, pangsa mereka terhadap total sekolah meningkat, menunjukkan potensi pengurangan jumlah sekolah negeri.

Gambar 10: Persentase pendaftaran sekolah swasta di negara-negara ASEAN, 2013 – 2021 (%)



Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan dari buku statistik tahunan Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam; Statistik & Indikator Pendidikan Swasta Kamboja; dan UIS.Stat

Catatan: *Persentase dari Myanmar, Filipina, Vietnam pada tahun 2013 mencerminkan data tahun 2014; Persentase dari Myanmar, Indonesia pada tahun 2019 mencerminkan data tahun 2018.



Seperti terlihat pada Gambar 10, persentase partisipasi sekolah swasta cenderung meningkat, kecuali di Kamboja, Filipina, dan Thailand. Indonesia dan Brunei secara konsisten memiliki tingkat partisipasi sekolah swasta tertinggi, yaitu lebih dari 25%. Sebaliknya, Laos dan Vietnam memiliki angka partisipasi sekolah swasta yang jauh lebih rendah, yaitu di bawah 5% sepanjang periode tersebut. Filipina menunjukkan tingkat partisipasi sekolah swasta yang moderat, yaitu lebih dari 16%, dan angka tersebut sedikit meningkat dari tahun ke tahun.

Apabila dibandingkan antar jenjang pendidikan, jumlah siswa yang mendaftar di pendidikan swasta tidaklah seragam. Di sebagian besar negara, angka partisipasi di institusi swasta meningkat seiring dengan tingkat pendidikan, kecuali Brunei. Di Brunei, pendidikan swasta tampaknya lebih disukai dari tingkat pra-sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sementara itu, Singapura, meskipun memiliki angka partisipasi sekolah dasar yang tinggi, menunjukkan tren penurunan pada pendidikan tinggi.

Filipina menunjukkan tren sebaliknya, dengan tingkat partisipasi pendidikan menengah atas yang lebih tinggi dibandingkan pendidikan dasar. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan angka partisipasi sekolah yang tinggi baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, namun terdapat tren penurunan di tingkat pendidikan tinggi. Tren yang kontras ini menunjukkan lanskap pendidikan swasta yang kompleks dan terus berubah di negara-negara ASEAN, tidak hanya bervariasi antar negara tetapi juga antar tahapan pendidikan di negara yang sama.

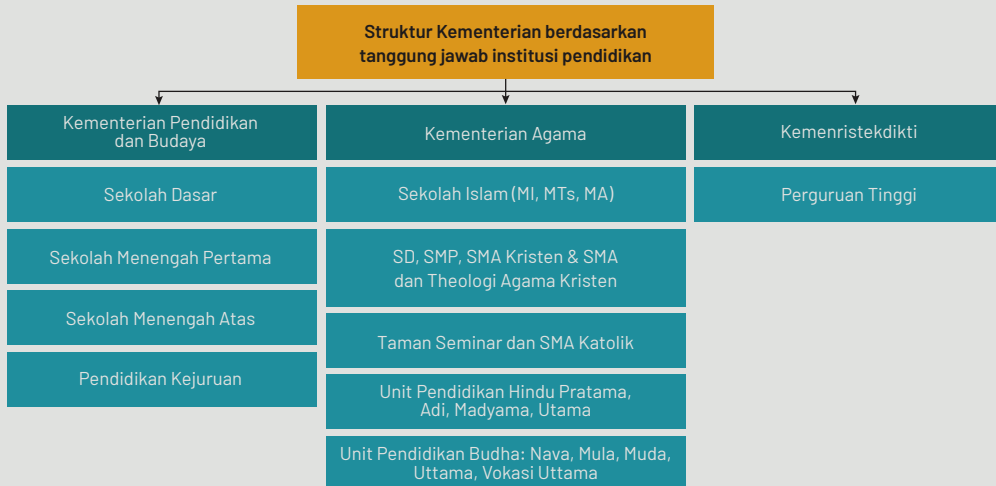
Meningkatnya permintaan terhadap pendidikan swasta di sebagian besar negara ASEAN dapat disebabkan oleh dua faktor. Pertama, siswa dan orang tua mereka semakin mencari lingkungan belajar yang dipersonalisasi, modern, dan internasional. Kedua, sekolah negeri sering kali penuh sesak, sehingga menyebabkan beberapa siswa mencari pilihan alternatif.

SEKOLAH

Case box 1: Pengeluaran untuk pendidikan di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang mempunyai sistem yang sedikit berbeda dalam bidang pendidikan, dimana Indonesia menempatkan lebih dari satu kementerian yang bekerja pada bidang pendidikan. Berdasarkan Bank Pembangunan Asia (BPA), tahun 2015 Pendidikan dasar, pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) dan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dikelola oleh kabupaten/kota, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertanggung jawab atas tata kelola sistem secara keseluruhan. Sekolah Islam dan Sekolah Berbasis Keagamaan lainnya dikelola dan diatur secara terpusat oleh Kementerian Agama (Kemenag). Pendidikan vokasi formal ditawarkan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pendidikan vokasi, sedangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi.

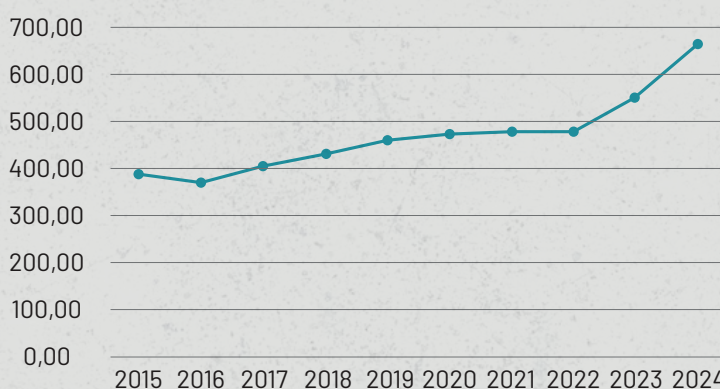
Gambar 11. Struktur Kementerian berdasarkan tanggung jawab lembaga pendidikan



Sumber: Penulis

Secara keseluruhan, anggaran pendidikan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Hal ini cukup konsisten setiap tahunnya meskipun terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 – 2021. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sarana pendidikan bagi peserta didiknya mencapai 10 triliun rupiah selama pandemi berdasarkan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung program pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Misalnya bantuan voucher internet untuk anak sekolah dari rumah, tunjangan kerja guru, bantuan pengobatan, dan lain-lain. Meningkatnya anggaran pendidikan di Indonesia merupakan amanat konstitusi negara.

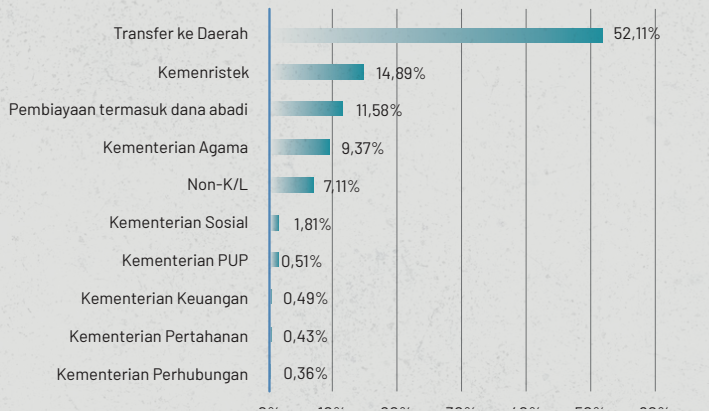
Gambar 12. Anggaran Pendidikan Indonesia (2015 – 2024) (Triliun Rupiah)



Source: Kementerian Keuangan, 2024

Indonesia memiliki alokasi anggaran pendidikan wajib sebesar 20 persen dari APBN/APBD (rencana anggaran nasional/rencana anggaran daerah) dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (4). Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa anggarannya secara konsisten berada pada angka 20% dari total anggaran nasional. Namun dalam penganggarannya sendiri terlihat proporsi anggaran yang digunakan untuk dana pendidikan terbagi ke beberapa kementerian, tidak hanya Kementerian Pendidikan saja sebagai pemangku kepentingan utama urusan pendidikan. Anggaran ini dibagi ke dalam program-program Kementerian yang mempunyai irisan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.

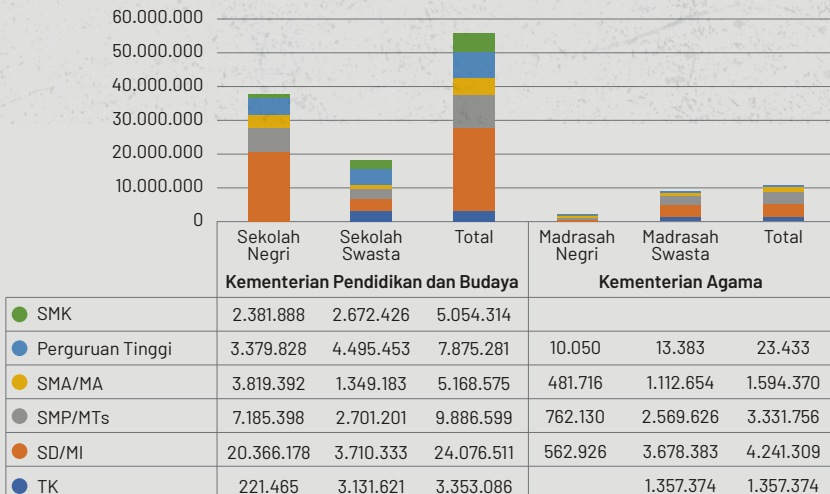
Gambar 13. Proporsi anggaran pendidikan tersebar di beberapa kementerian dan transfer ke daerah (2024)



Sumber: Kementerian Pendidikan

Di sisi lain, Indonesia memiliki jumlah siswa sekolah swasta yang besar. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), sekolah swasta menyumbang 32,6% dari total siswa di bawah Kementerian Pendidikan. Secara proporsi, Kementerian Agama memiliki jumlah sekolah swasta yang jauh lebih banyak, dimana 83% sekolah di bawah Kementerian Agama merupakan sekolah swasta. Fakta ini juga harus dibaca dalam konteks sejarah. Sejak masa kolonial, pendidikan formal bagi penduduk asli Indonesia dimulai oleh organisasi afiliasi keagamaan yang memiliki cabang di seluruh negeri, sesuai dengan sekolah yang didirikan oleh penguasa kolonial.

Gambar 14. Jumlah Siswa di Sekolah Antar Kementerian (Negeri dan Swasta)



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia



Literatur yang ada secara konsisten menunjukkan perbedaan rata-rata hasil belajar siswa di sekolah negeri dan swasta (Alexander & Pallas, 1983). Di ASEAN, ketika membandingkan kinerja siswa antara sekolah negeri dan swasta, khususnya di tingkat dasar, terdapat kesenjangan besar dalam hal keunggulan siswa di sekolah swasta di banyak negara, termasuk Kamboja, Laos, dan Filipina. Siswa sekolah swasta secara signifikan mengungguli siswa sekolah negeri dalam hal membaca, menulis dan matematika (Lao PDR MoES & UNICEF Lao PDR, 2022; MoEYS, 2021; Philippines Department of Education & UNICEF Philippines, 2021). Selain itu, siswa di sekolah dasar swasta di enam negara tersebut (Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam) mencapai nilai rata-rata lebih tinggi dalam membaca dan menulis dibandingkan rata-rata nasional (Philippines Department of Education & UNICEF Philippines, 2021). Kesenjangan prestasi yang teramati sebagian dapat dijelaskan oleh faktor sosial ekonomi. Siswa yang terdaftar di sekolah dasar swasta seringkali berasal dari keluarga kelas menengah dengan sumber daya keuangan yang lebih besar, yang dapat berkontribusi terhadap prestasi akademik mereka (Department of Education, Skills and Employment, 2021).

Kesenjangan ini mungkin menyempit pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Di Thailand, siswa pendidikan menengah sering kali lebih memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta, karena mereka percaya bahwa pendaftaran sekolah akan meningkatkan prospek mereka untuk diterima di universitas bergengsi di Thailand (Department of Education, Skills and Employment, 2021). Pola serupa juga terjadi di Vietnam. Siswa Vietnam sering kali memprioritaskan bersekolah di sekolah negeri dan program siswa berbakat luar biasa, karena mereka percaya bahwa hal ini akan memberi mereka keuntungan dalam proses penerimaan yang kompetitif baik di universitas bergengsi dalam negeri maupun internasional. Jika siswa Vietnam tidak memenuhi persyaratan ujian masuk sekolah negeri, mereka akan mendaftar di sekolah menengah atas swasta (Glewwe & Patrinos, 1998). Sementara itu, di Indonesia, pada tahun 2019, hasil ujian nasional memperlihatkan heterogenitas hasil pendidikan antar kelompok siswa (Tabel 7). Meskipun sekolah negeri memperoleh sedikit keunggulan dalam nilai rata-rata, sekolah swasta mempunyai konsentrasi siswa yang berprestasi lebih tinggi. Sebaliknya, sekolah negeri menunjukkan sedikit keunggulan dalam mendukung siswa yang berprestasi rendah. Intinya, sekolah swasta unggul dalam membina siswa berpotensi tinggi, sedangkan sekolah negeri memberikan dukungan yang lebih kuat bagi siswa yang mengalami kesulitan.

Tabel 7: Membandingkan nilai ujian nasional (UNBK dan UNKP) sekolah negeri dan swasta di Indonesia, 2019 (%)

Indikator	Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
Total Rata-Rata	53.00	52.27
Rata-rata 10% Siswa Teratas	80.52	83.37
Rata-rata Siswa 10% Terbawah	35.54	34.55

Rata-rata 10% Sekolah Teratas	72.90	75.79
Rata-rata Sekolah 10% Terbawah	38.97	37.74

Sumber: Sintesis penulis

Meskipun pendidikan swasta memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak, hal ini menimbulkan beberapa tantangan dan kekhawatiran, terutama terkait dengan pendanaan, keterjangkauan, dan jaminan kualitas.

Tantangan pertama terkait privatisasi pendidikan adalah pendanaan. Lembaga pendidikan swasta adalah badan usaha yang beroperasi secara mandiri dan mengembangkan sistem administrasinya. Namun, kemandirian ini berarti bahwa setiap sekolah swasta mempunyai tanggung jawab sendiri dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan pendanaannya. Hal ini mencakup kebebasan berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara mandiri, menumbuhkan kemandirian akademik. Sebaliknya, terbatasnya subsidi pemerintah memaksa universitas mencari sumber pendanaan alternatif, seringkali melalui kolaborasi dengan sektor korporasi untuk pengembangan fisik dan sponsorship. Meskipun keterlibatan perusahaan dapat memperkenalkan inovasi dan sumber daya keuangan, hal ini juga menimbulkan implikasi ekonomi, yang berpotensi menyebabkan peningkatan biaya sekolah. Meskipun biaya sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai komitmen untuk memastikan akses terhadap pendidikan yang lebih komprehensif dan setara.

Kedua, jaminan kualitas masih menjadi perhatian karena standar pendidikan yang diberikan oleh institusi swasta sangat beragam. Mereka mungkin mengadopsi kurikulum pengajaran nasional atau mengembangkan kurikulum mereka. Banyak sekolah swasta berkolaborasi dengan sekolah internasional untuk mempertahankan standar pengajaran internasional, seringkali dengan mengintegrasikan kurikulum Barat dengan budaya negara tersebut. Namun pendekatan ini dapat menyebabkan kurangnya keseragaman dalam kualitas pendidikan yang diberikan. Selain itu, beberapa negara ASEAN, seperti Vietnam, tidak memiliki kerangka peraturan yang kuat untuk memastikan lembaga swasta memenuhi standar pendidikan yang ketat. Misalnya, laporan menunjukkan bahwa beberapa sekolah menengah swasta di Vietnam mempunyai program kerja sama dengan sekolah 'hantu' di luar negeri, sehingga meningkatkan kekhawatiran mengenai legitimasi kemitraan tersebut (Đặng Nguyễn, 2018).

Case box 2: Sekolah Swasta Kelas Ekonomi Menengah-Rendah di Indonesia

Berbeda dengan sekolah swasta pada umumnya, sekolah swasta di Indonesia tidak hanya menjadi sekolah mewah bagi kalangan kaya saja. Banyak diantaranya merupakan sekolah swasta miskin dengan fasilitas yang sangat minim. Sekolah swasta juga dikelola oleh organisasi masyarakat (seperti organisasi keagamaan misalnya) seperti terlihat pada gambar 15 dimana Kementerian Agama membawahi sekolah agama. Misalnya kasus pertama, sekolah swasta Islam di Desa Mandalamukti, Bandung Barat, yang fasilitasnya kurang memadai. Gambar menunjukkan fasilitas gedung kelas yang setengah jadi.

Gambar 15. Madrasah Swasta Islam di Desa Mandalamukti, Bandung Barat yang mempunyai fasilitas kurang memadai



(Sumber: KOMPAS/Bagus Puji Panuntun)

Kasus kedua terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 4 Bandar Lampung –di bawah pengelolaan Persatuan Guru Republik Indonesia. Sekolah ini harus berjuang keras untuk mendanai kegiatannya karena mereka mungkin tidak lagi menerima bantuan operasional sekolah (BOS, atau subsidi dana dari pemerintah). Sekolah ini juga menampung siswa miskin yang jumlah siswanya terbatas (60 anak) dan sebagian besar adalah anak panti asuhan.

Gambar 16. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PGRI 4 Bandar Lampung memiliki jumlah siswa yang terbatas.



Sumber: Kompas

Selain itu, keterjangkauan masih menjadi hambatan yang signifikan. Tingginya biaya pendidikan swasta dapat menjadi penghalang bagi keluarga berpenghasilan rendah, sehingga menciptakan situasi yang tidak adil di mana akses terhadap sumber daya dan peluang yang lebih baik bergantung pada kekayaan orang tua. Tabel 9 membandingkan rata-rata biaya sekolah bulanan sekolah menengah negeri dan swasta di Vietnam (Hanoi, 2023) dan Indonesia (2021), serta beban biaya tersebut terhadap pendapatan bulanan rata-rata di masing-masing negara. Secara keseluruhan, meskipun biaya sekolah menengah atas di Indonesia tergolong moderat, biaya sekolah di Vietnam, terutama untuk sekolah swasta, dapat memberikan tekanan finansial yang besar pada rumah tangga. Beban keuangan biaya sekolah menengah atas di Indonesia dan Vietnam (Hanoi) sangat bervariasi, dengan keterjangkauan yang berbeda-beda. Di Indonesia (2021), rata-rata pendapatan bulanan adalah Rp 2,7 juta, dengan kontribusi biaya sekolah menengah negeri dan swasta masing-masing sebesar 22% dan 27% dari pendapatan tersebut, yang menunjukkan perbedaan beban keuangan yang moderat dan relatif kecil. Sebaliknya, di Vietnam (Hanoi, 2023), yang pendapatan bulanan rata-ratanya adalah 9,2 juta VND, kisaran biaya sekolah menimbulkan spektrum beban keuangan yang lebih luas. Biaya sekolah di sekolah menengah negeri berkisar antara 3% hingga 66% dari pendapatan rata-rata, sedangkan biaya sekolah di sekolah menengah swasta berkisar antara 8% hingga 1.043%. Tabel tersebut menunjukkan bahwa sekolah menengah swasta dapat menjadi beban keuangan yang signifikan bagi keluarga di Vietnam dan Indonesia, terutama di Vietnam dimana biaya sekolah swasta jauh lebih besar dibandingkan biaya sekolah negeri dan persentase pendapatan rata-rata bulannya jauh lebih besar.

Tabel 8: Pengeluaran pendidikan dalam total pendapatan Indonesia, 2021 dan Vietnam (di Hanoi), 2023

		Sekolah Negeri	Sekolah Swasta
Indonesia (2021)	Biaya kuliah (Rata-rata)	Rp 0,6 juta/bulan	Rp 0,75 juta/bulan
	Beban atas pendapatan bulanan rata-rata (Rp 2,7 juta)	22%	27%
Vietnam (di Hanoi, 2023)	Biaya kuliah* (Rata-rata)	0,3 – 6,1 juta VND/ bulan	0,8 – 96 juta VND/ bulan
	Beban atas pendapatan bulanan rata-rata (9,2 juta VND)	3 – 66%	8 – 1043%

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan CEIC; Khánh An (2023); GSO (2023); dan BPS-Statistik Indonesia (2021).

Catatan: *Di Vietnam, terdapat beberapa program untuk tingkat sekolah menengah atas (Standar dan Kualitas Tinggi). Misalnya 0,3 juta untuk kelas standar SMA Negeri dan 6,1 juta untuk kelas mutu SMA Negeri.

Case box 3: Beban pengeluaran untuk pendidikan di Vietnam

Selama tahun 2013-2023, pengeluaran publik untuk pendidikan di Vietnam mencapai rata-rata 16% dari anggaran negara, berada di bawah standar negara sebesar 20%. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengalokasikan anggaran negara untuk pendidikan. Proporsi belanja pendidikan dalam APBD menunjukkan apakah pemerintah daerah memprioritaskan pendidikan. Sebagian besar provinsi meningkatkan pengeluaran rutin untuk pendidikan lebih cepat (atau menurunkannya lebih lambat) dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi sektor prioritas bagi pemerintah daerah (BTAP et al., 2023).

Pengeluaran untuk pendidikan di Vietnam sangat bergantung pada pengeluaran pemerintah. Struktur belanja anggaran negara tidak seimbang, dengan fokus pada belanja saat ini (terutama untuk gaji) sekitar 80% – dengan belanja investasi dan pembangunan yang terbatas (sekitar 20% selama tahun 2013-2017) (Penyelesaian Rekening Akhir Anggaran Negara dari Perbendaharaan Negara Vietnam, seperti dikutip dalam Vu Sy Cuong, 2020). Terdapat permintaan yang tinggi untuk perbaikan infrastruktur pendidikan dan penambahan ruang kelas. Namun, terbatasnya investasi dan belanja pembangunan kemungkinan besar menyebabkan ruang kelas di sekolah negeri terlalu penuh. Permasalahan ruang kelas yang padat lebih parah terjadi di wilayah perkotaan. Misalnya, rata-rata jumlah siswa dalam satu kelas di sekolah menengah atas di Ha Noi selama tahun ajaran 2022-2023 adalah 41. Angka ini bisa melebihi 60 di sekolah-sekolah yang terletak di distrik dalam kota. Selama sepuluh tahun terakhir, meskipun sekolah mengalami kelebihan beban, hampir tidak ada sekolah menengah baru yang dibangun di distrik-distrik dalam kota ini.

Investasi swasta meningkat (hampir dua kali lipat, dari VND 8.070 miliar menjadi VND 15.493 miliar), namun persentase investasi swasta di bidang pendidikan masih merupakan porsi yang kecil (kurang dari 1%) dari total investasi. Selain itu, proporsi ini cenderung menurun terutama sejak adanya pandemi COVID-19 (dari 0,9% pada tahun 2013 menjadi 0,65% pada tahun 2022) (GSO, 2024).

Sumbangan pendidikan juga terbatas karena kurangnya kebijakan preferensial. Menurunnya porsi belanja pemerintah untuk pendidikan, ditambah dengan terbatasnya investasi swasta dan kelangkaan donor pendidikan, secara bertahap telah mengalihkan beban keuangan ke rumah tangga dan pelajar, sehingga mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung semakin rentan dan tertinggal (Parajuli et al., 2020; Trinh Ngoc Thach, 2019).

Halaman ini sengaja dikosongkan.



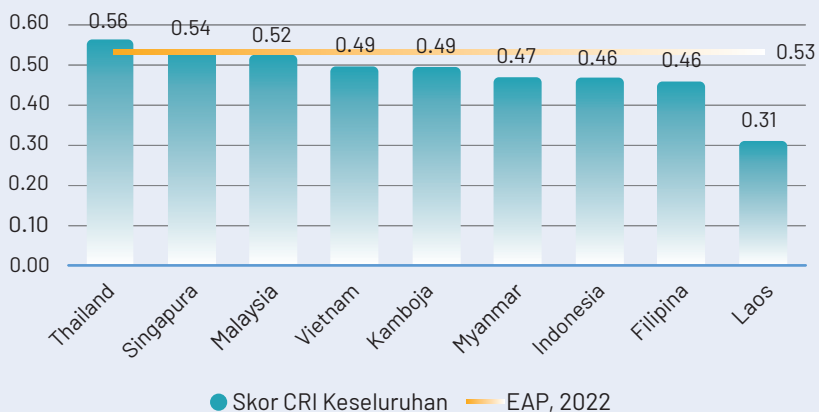


04 Dampak Terhadap Ketimpangan dan Pertumbuhan Inklusif



DFI & Oxfam (2022) mengembangkan Indeks Komitmen Mengurangi Ketimpangan (CRII- *Commitment to Reducing Inequality Index*) untuk menyoroti pentingnya belanja publik di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Seluruh negara ASEAN berada pada paruh bawah indeks ini. Thailand dan Singapura telah mengadopsi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan, sehingga menghasilkan skor CRII yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah EAP (*East Asia Pacific*).

Gambar 17: Skor dan peringkat CRII untuk negara-negara ASEAN, 2022



Source: DFI and Oxfam (2022)



Ketimpangan dapat diatasi secara efektif melalui pengeluaran anggaran untuk layanan publik seperti pendidikan. Indikator cakupan pendidikan mengukur tingkat penyelesaian pendidikan menengah bagi kuintil termiskin. Myanmar, Kamboja, dan Laos, tiga negara ASEAN terbelakang, ditempatkan di antara negara-negara terbawah di dunia menurut CRIL dalam hal cakupan pendidikan. Secara spesifik, Myanmar menduduki peringkat 141 dari 161 negara yang dievaluasi. Di sisi lain, Singapura mendapat skor terbaik pada indikator ini. Malaysia dan Filipina juga menonjol sebagai negara yang mencapai kemajuan signifikan dalam menyekolahkan anak-anak termiskin di kawasan ASEAN, dengan Malaysia mencapai lebih dari 63% cakupan pendidikan dan Filipina mencakup lebih dari 50%. Dalam hal peringkat dunia, tiga negara terakhir berada di peringkat teratas dari keseluruhan negara yang dinilai.

Tabel 9: Skor CRIL untuk belanja anggaran pendidikan negara-negara ASEAN, 2022

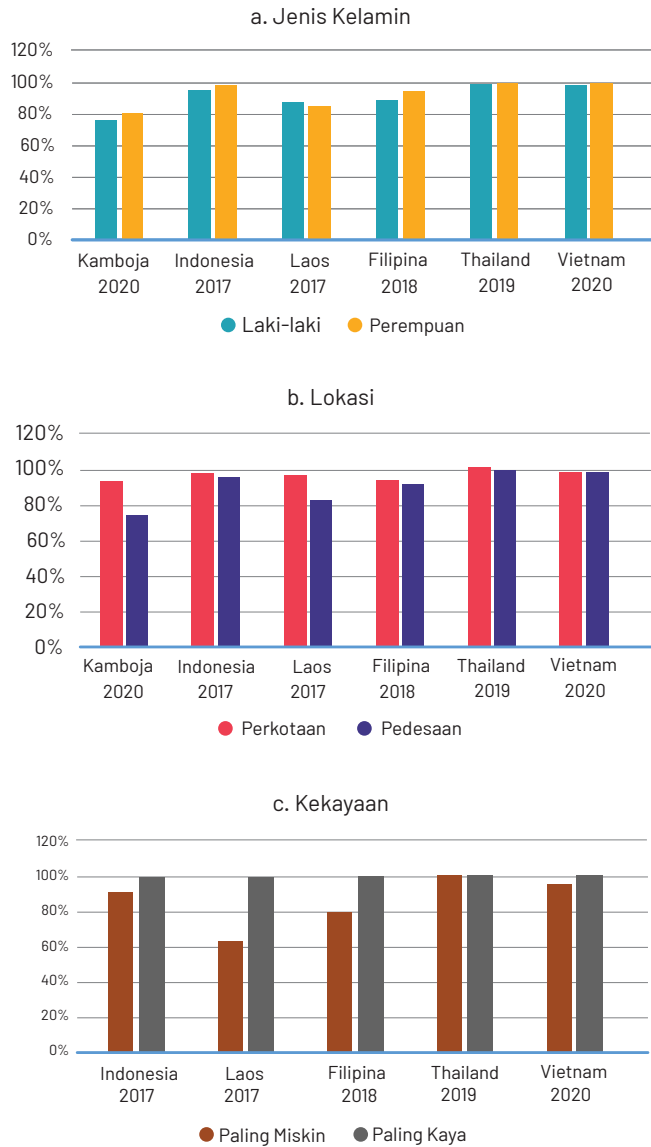
Negara	Belanja pendidikan sebagai % total belanja		Cakupan pendidikan		Dampak gabungan dari belanja tiga sektor terhadap Gini		Progresifitas Pelayanan Publik
	%	Rank	Nilai Std	Rank	Insidensi	Rank	Rank
Singapura	16.48	46	0.95	11	-0.028	110	80
Malaysia	20.35	17	0.63	65	-0.021	126	89
Filipina	15.55	59	0.52	74	-0.028	111	106
Thailand	12.14	101	0.48	79	-0.033	98	60
Indonesia	16.00	51	0.34	89	-0.022	123	112
Vietnam	14.82	70	0.21	101	-0.033	99	102
Laos	11.76	108	0.05	131	-0.016	137	144
Kamboja	17.57	33	0.05	132	-0.016	138	126
Myanmar	14.02	80	0.02	141	-0.009	155	141

Sumber: DFI dan Oxfam (2022)

Penelitian ini juga mengevaluasi kesetaraan akses terhadap peluang pendidikan di negara-negara ASEAN berdasarkan gender, lokasi, dan kekayaan. Kajian terhadap tingkat penyelesaian sekolah dasar di beberapa negara ASEAN menunjukkan bahwa kesenjangan dalam mengakses pendidikan di semua kategori tersebut semakin menyempit. Namun, kesenjangan masih terjadi di wilayah pedesaan dan di kalangan masyarakat termiskin.



Gambar 18: Tingkat kelulusan sekolah dasar di negara-negara ASEAN, tersedia terbaru pada tahun 2017 – 2020 (%)



Sumber data: Basis Data Ketimpangan Dunia dalam Pendidikan (WIDE)

Gambar 18 mengilustrasikan tingkat penyelesaian pendidikan dasar di negara-negara ASEAN. Dalam hal kesetaraan gender, sebagian besar negara hampir mencapai kesetaraan dalam tingkat penyelesaian pendidikan dasar, dengan Thailand dan Vietnam yang menunjukkan kesetaraan yang patut dicontoh. Thailand menunjukkan konsistensi yang luar biasa dengan tingkat penyelesaian yang tinggi, mencapai 100% pada tahun 2019.



Demikian pula, Vietnam menunjukkan tingkat penyelesaian yang tinggi dan membaik, dengan tingkat penyelesaian yang hampir sempurna (98% untuk laki-laki dan 99% untuk perempuan) pada tahun 2020. Namun, terdapat kesenjangan gender yang nyata di negara-negara lain, dengan tingkat kelulusan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam hal pembagian lokasi, wilayah perkotaan umumnya memiliki tingkat penyelesaian yang lebih baik, khususnya di Kamboja dan Laos. Di Kamboja, tingkat kelulusan sekolah dasar untuk siswa di perkotaan dan pedesaan masing-masing adalah 93% dan 74%, sedangkan di Laos masing-masing sebesar 96% dan 82%. Sebaliknya, siswa sekolah dasar di daerah pedesaan tidak jauh tertinggal dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Terkait dengan faktor sosial ekonomi, terdapat kesenjangan yang nyata antara kuintil termiskin dan terkaya. Terdapat perbedaan yang mencolok di Laos, dimana kelompok termiskin mencapai tingkat penyelesaian sebesar 63% dibandingkan dengan 99% bagi kelompok terkaya, hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan berdasarkan kekayaan. Kesenjangan ini tidak terlalu terlihat di negara-negara lain. Kesenjangan yang nyata antara kelompok termiskin dan terkaya juga terlihat di Indonesia. Terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki persentase institusi pendidikan swasta tertinggi, dan Laos memiliki tingkat pertumbuhan sekolah swasta paling signifikan.

Kami juga menambahkan indeks paritas gender untuk melihat bagaimana pendidikan inklusif di negara-negara ASEAN terkait aspek gender dalam partisipasi pendidikan.

Tabel 10: Indeks Paritas Gender (GPI) partisipasi sekolah di sekolah dasar, 2013 – 2021

Nama Negara	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Brunei	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.01	1.01	1.00	..
Kamboja	0.91	0.94	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98
Indonesia	1.00	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97
Laos	0.94	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97
Malaysia	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	..
Myanmar	..	0.97	..	0.97	0.95	0.96
Filipina	..	0.98	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98
Singapura	0.99	0.98	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	..
Thailand	0.99	1.02	0.94	1.00	0.93	0.99	0.99	0.99	0.99
Vietnam	0.98	1.00	1.00	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02

Sumber Data: Data Bank Dunia, 2022

Catatan: .. data tidak tersedia



Tabel 10 menggambarkan bahwa Indeks Paritas Gender (GPI) untuk partisipasi sekolah dasar dari tahun 2013 hingga 2021 di berbagai negara memberikan gambaran sekilas tentang bagaimana kesetaraan gender dalam pendidikan berkembang. Brunei, misalnya, telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa, dengan mempertahankan GPI di kisaran 1,00 sepanjang tahun, yang mencerminkan keseimbangan antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan di sekolah dasar. Demikian pula dengan Kamboja yang telah membuat kemajuan besar menuju kesetaraan gender, dengan meningkatkan GPI-nya dari 0,91 pada tahun 2013 menjadi 0,98 pada tahun 2021, yang menunjukkan adanya pergerakan signifikan menuju kesetaraan kesempatan pendidikan bagi kedua gender.

Namun di Indonesia, terdapat perbedaan kecil dalam jumlah partisipasi laki-laki dibandingkan perempuan pada periode tersebut, dengan penurunan GPI dari 1,00 pada tahun 2011 menjadi 0,97 pada tahun 2016. Negara-negara lain, seperti Laos dan Filipina, telah menunjukkan tren positif dalam mencapai kesetaraan gender di negara-negara tersebut. pendidikan, dengan kedua negara mendekati GPI 1,00 dalam beberapa tahun terakhir. GPI Malaysia tetap stabil di angka 1,01, yang menunjukkan berlanjutnya kesetaraan gender. Meskipun data di Myanmar menunjukkan fluktuasi, Thailand mempertahankan GPI yang mendekati paritas meskipun terjadi penurunan pada tahun 2015. Hebatnya, Vietnam menunjukkan peningkatan yang signifikan, beralih ke GPI yang menunjukkan angka partisipasi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki mulai tahun 2015 dan seterusnya, dengan GPI di atas 1,02. Tren-tren ini tidak hanya menyoroti upaya-upaya yang dilakukan menuju kesetaraan gender dalam pendidikan di negara-negara tersebut namun juga menggarisbawahi tantangan dan kemajuan dalam memastikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan.

Saat ini, beberapa kebijakan dan inisiatif di ASEAN mendorong pendidikan inklusif dan mengatasi kesenjangan pendidikan. Upaya-upaya ini berfokus pada memastikan akses yang adil terhadap pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang gender, lokasi, atau latar belakang sosial ekonomi. Semua negara anggota ASEAN mengakui pendidikan inklusif sebagai hak mendasar bagi setiap anak. Pengakuan ini tertuang dalam konstitusi dan undang-undang pendidikan mereka, sehingga mengarah pada pengembangan beberapa strategi untuk memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan pendidikan. Beberapa strategi utama diuraikan pada Tabel 11.

Tabel 11: Kelompok strategi terpilih untuk menyamakan akses terhadap peluang pendidikan di negara-negara ASEAN

Kategori	Negara	Strategi
Pendidikan gratis	Semua negara	Pendidikan gratis setidaknya untuk beberapa jenjang pendidikan dasar, kebanyakan diberikan untuk pendidikan dasar
Beasiswa dan subsidi	Vietnam	Mensubsidi dan membebaskan atau mengurangi biaya sekolah bagi peserta didik yang merupakan anggota etnis minoritas di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang menantang; anak yatim dan orang tak berdaya; penyandang cacat yang mengalami kesulitan ekonomi
	Singapura	Warga negara Singapura akan menerima kontribusi tahunan sejak awal pendidikan sekolah dasar hingga mereka menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Berikut jumlah yang akan diterima anak-anak Singapura tahun ini (2024): <ul style="list-style-type: none"> • Siswa sekolah dasar: US\$230 • Siswa sekolah menengah: US\$290
		Beasiswa Afirmasi bagi anak masyarakat yang memerlukan perlakuan khusus untuk menempuh Program Magister atau Doktor.
Laos	Beasiswa telah diberikan kepada siswa di sekolah berasrama etnis dan hingga 40% siswa di lembaga TVET (<i>Technical and Vocational Education and Training</i>) yang berfokus pada anak perempuan dan siswa dari keluarga miskin. Kementerian ESDM telah mengarahkan ODA terutama ke daerah-daerah tertinggal.	
Pinjaman pelajar	Malaysia	Mendirikan Perusahaan Dana Pendidikan Tinggi Nasional (Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, atau PTPTN) untuk menawarkan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi, dengan pembayaran kembali dimulai enam bulan setelah kelulusan.

Pinjaman pelajar	Thailand	<i>Student Loan Fund</i> (SLF) memberikan pinjaman untuk biaya sekolah dan biaya hidup kepada mahasiswa yang tidak mampu secara finansial. Pelunasan dimulai satu tahun setelah kelulusan dan dapat diperpanjang hingga 15 tahun.
	Vietnam	Pemerintah memberikan pinjaman mahasiswa melalui Bank Kebijakan Sosial Vietnam dengan tingkat bunga istimewa. Pinjaman tersedia bagi siswa dari latar belakang kurang beruntung (anak yatim piatu, rumah tangga berpenghasilan rendah, dll) yang bersekolah di universitas, perguruan tinggi, dan program pelatihan kejuruan.
Memprioritaskan kelompok yang kurang beruntung	Indonesia	Dukungan langsung terhadap program afirmasi pendidikan yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses masyarakat di daerah 3T, daerah khusus, dan kelompok masyarakat khusus lainnya (keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan lain-lain) terhadap layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
	Myanmar	Penyandang disabilitas menerima pengajaran melalui program dan administrasi yang tidak biasa berdasarkan program pendidikan luar biasa yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, tunarungu, lemah secara rasional, dan pembelajar lainnya..
Pemerintah menyiapkan kelas-kelas untuk kelompok etnis dengan bahasa etnis mereka sebagai bahasa pengantar di tingkat pendidikan dasar.		
	Vietnam	Memberikan nilai tambahan dalam ujian nasional bagi siswa dari latar belakang geografis yang kurang beruntung, seperti mereka yang berada di daerah terpencil dan pegunungan (Wilayah 1) dan daerah pedesaan (Wilayah 2-NT), serta siswa dari etnis minoritas dan anak-anak veteran yang terluka.

		Melaksanakan program penerimaan khusus ke universitas bagi mahasiswa dari provinsi yang menghadapi tantangan tertentu.
--	--	--

Sumber: Sintesis dan klasifikasi penulis





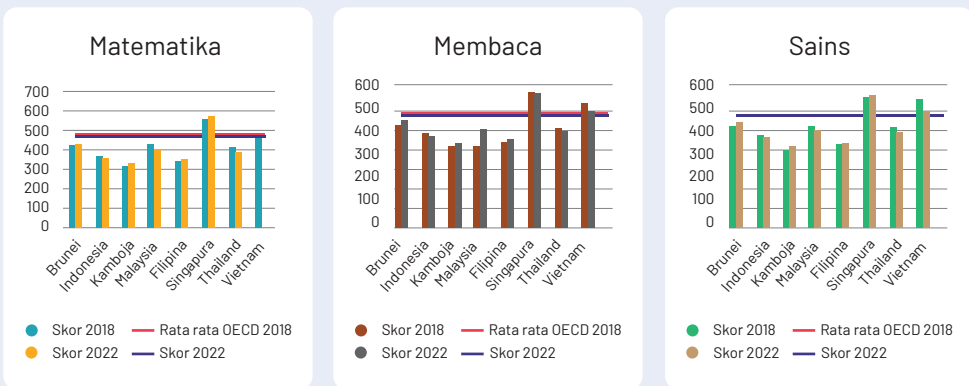
05 Pencapaian dan Tantangan: Pendidikan di ASEAN



5.1. Pencapaian pendidikan di negara-negara ASEAN

Selama bertahun-tahun, negara-negara ASEAN telah menunjukkan upaya untuk mencapai prestasi pendidikan yang lebih tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh skor mereka pada Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Namun, skor PISA di sebagian besar negara-negara tersebut berada di bawah rata-rata OECD. Meskipun skor beberapa negara meningkat, skor beberapa negara cenderung menurun.

Gambar 19: Nilai PISA bidang matematika, membaca, dan sains di negara-negara ASEAN, 2018-2022



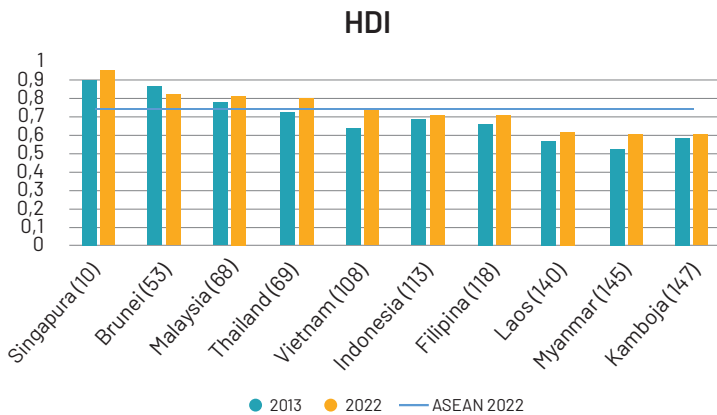
Sumber: Hasil PISA 2022



Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 19, skor PISA di negara-negara ASEAN bervariasi secara signifikan pada tahun 2022. Singapura menonjol sebagai negara dengan kinerja terbaik yang konsisten di ketiga kategori tersebut, dengan skor yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD pada kedua tahun tersebut. Hal ini dapat menjadi tolok ukur atau studi kasus yang berharga bagi negara-negara lain di kawasan ini. Vietnam juga patut mendapat pengakuan karena secara konsisten memperoleh nilai yang mendekati rata-rata OECD di semua kategori. Namun, negara-negara ASEAN lainnya secara konsisten mendapat skor jauh di bawah rata-rata. Nilai Kamboja adalah yang terendah di ketiga kategori tersebut, hal ini menunjukkan potensi tantangan di sektor pendidikan yang memerlukan perhatian terfokus.

Sementara itu, Gambar 20 menunjukkan tren kinerja yang beragam antar negara. Indonesia, Thailand, dan Vietnam mengalami penurunan skor untuk ketiga kategori tersebut antara tahun 2018 dan 2022. Sebaliknya, skor Brunei justru meningkat selama periode ini.

Gambar 20: Peringkat HDI (*Human Development Index*) di negara-negara ASEAN, 2022



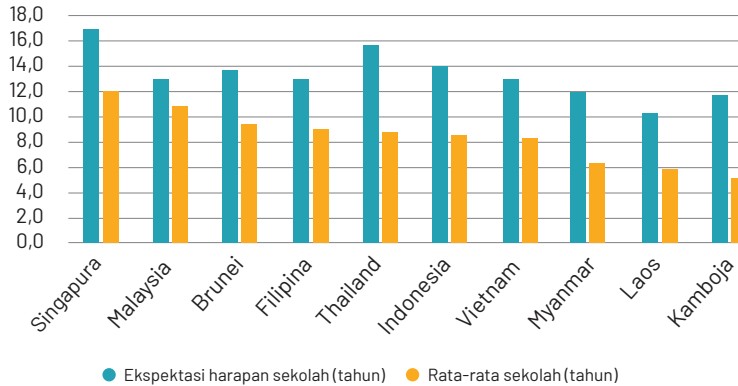
Sumber: UNDP (2024), UNDP (2014).

Catatan: Peringkat internasional negara-negara pada tahun 2022 ada dalam tanda kurung.

Seperti terlihat pada Gambar 14, selama periode 2013–2022, peringkat HDI negara-negara ASEAN sedikit mengalami peningkatan. Singapura dan Brunei secara konsisten memiliki skor IPM tertinggi di kawasan, menempatkan mereka pada kelompok dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi. Sementara itu, enam negara—Vietnam, Indonesia, Filipina, Laos, Kamboja, dan Myanmar—masih memiliki skor IPM di bawah rata-rata regional ASEAN.



Gambar 21: Perkiraan lama pendidikan dan rata-rata lama sekolah di negara-negara ASEAN, 2022



Sumber: UNDP (2024)

Gambar 21 mengilustrasikan perbedaan lama pendidikan yang diharapkan dan rata-rata lama sekolah di antara negara-negara ASEAN. Terdapat kesenjangan yang nyata antara lama sekolah yang diharapkan dan rata-rata lama sekolah. Perbedaan terbesar terjadi di Kamboja, dan perbedaan terkecil terjadi di Malaysia.

5.2. Tantangan dalam memobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pendidikan

Untuk mencapai prestasi pendidikan yang lebih tinggi dan kesetaraan akses terhadap kesempatan pendidikan memerlukan peningkatan investasi di bidang pendidikan. Sayangnya, mobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pendidikan di negara-negara ASEAN menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, berdasarkan Asian Development Bank (ADB) (2022), salah satu tantangan dalam mobilisasi sumber daya dalam negeri adalah progresivitas pajak yang secara umum rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara maju. Rata-rata tingkat standar CIT di kawasan ASEAN hanya 20,85% pada tahun 2023, dibandingkan dengan 23,6% di OECD, dan cenderung menurun selama sepuluh tahun terakhir (PRAKARSA, 2024). Demikian pula penerapan pajak kekayaan hanya terbatas pada pajak properti dan warisan, keduanya kurang dimanfaatkan. Rendahnya pajak membatasi kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan untuk pelayanan publik, termasuk pendidikan.

Kedua, kendala ekonomi merupakan tantangan lain dalam memobilisasi sumber daya domestik untuk mendukung pendidikan. Dalam konteks perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi COVID-19, pendapatan pemerintah seringkali terbatas sehingga membatasi jumlah dana publik yang tersedia untuk pendidikan. Selama krisis ekonomi, anggaran pendidikan seringkali menjadi pihak yang pertama kali dipotong, sehingga sekolah terpaksa beroperasi

dengan sumber daya yang lebih sedikit. Misalnya, selama periode pandemi COVID-19, sebagian besar negara ASEAN mengurangi anggaran pendidikannya secara signifikan.

Selain itu, terbatasnya dukungan kebijakan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan dapat menghambat mobilisasi sumber daya dalam negeri. Di negara-negara ASEAN, dokumen hukum mendorong investasi swasta di bidang pendidikan dan otonomi dalam pendidikan tinggi. Dana untuk lembaga pendidikan swasta dan universitas otonom dapat berasal dari biaya kuliah, biaya dan sponsor komunitas. Banyak negara memiliki tradisi kontribusi masyarakat untuk membantu membayar biaya universitas. Kontribusi tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain sponsorship atau kerjasama dengan dunia usaha, sumbangan alumni, pihak universitas (melalui kegiatan usaha atau perusahaannya), dan keuntungan yang diperoleh dari modal universitas (endowment). Universitas negeri di Singapura dan Malaysia baru-baru ini menerapkan kebijakan untuk mengumpulkan dana abadi mereka (Trinh Ngoc Thach, 2019). Namun, beberapa negara, seperti Vietnam, tidak memiliki lingkungan kebijakan untuk menarik sumber daya pendidikan, sehingga menyebabkan kesulitan dalam memobilisasi sumber daya untuk pendidikan.

Selain itu, distribusi sumber daya yang tidak adil dapat membatasi mobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pendidikan. Kurangnya distribusi sumber daya pendidikan yang adil menciptakan kesenjangan yang mempengaruhi efektivitas dan keadilan sistem pendidikan. Ketika sumber daya terkonsentrasi, mereka akan kesulitan dengan fasilitas, guru, dan materi yang tidak memadai. Misalnya, jika pemerintah secara tidak proporsional mengalokasikan sebagian besar dana pendidikan ke sekolah-sekolah bergengsi di kota-kota besar, sekolah-sekolah di daerah pedesaan mungkin akan kesulitan dengan buku-buku pelajaran yang ketinggalan jaman, infrastruktur yang buruk, dan pergantian guru yang tinggi karena gaji yang kurang kompetitif. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan di daerah-daerah yang kurang terlayani dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan pendapatan pajak yang adil. Akibatnya, warga negara mungkin kurang berminat untuk mendukung peningkatan pendanaan pendidikan melalui pajak atau kontribusi lainnya jika mereka merasa bahwa manfaatnya tidak didistribusikan secara adil, sehingga membatasi keseluruhan sumber daya dalam negeri yang tersedia untuk pendidikan. Siklus kesenjangan dan berkurangnya potensi pendanaan menghambat perbaikan pendidikan dan memperlebar kesenjangan sosio-ekonomi.



06 Simpulan dan Rekomendasi



6.1. Simpulan

Laporan ini mengkaji dampak strategi keuangan terhadap pendidikan di negara-negara ASEAN setelah pandemi COVID-19, dengan fokus utama pada belanja pemerintah dan tren privatisasi.

Dari tahun 2013 hingga 2022, belanja publik untuk pendidikan di negara-negara ASEAN bervariasi secara signifikan, yang mencerminkan perbedaan dalam prioritas dan kemampuan investasi masing-masing negara di bidang pendidikan. Dalam hal pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase terhadap PDB, sebagian besar negara mengalami penurunan belanja publik. Namun, Kamboja dan Filipina merupakan pengecualian. Filipina mengalami peningkatan belanja terbesar, diikuti oleh Kamboja. Sebaliknya, Laos dan Malaysia mengalami penurunan paling signifikan. Pada tahun 2013, Malaysia mempunyai pengeluaran tertinggi, sedangkan Filipina memimpin pada tahun 2022. Sepanjang periode tersebut, Myanmar dan Kamboja secara konsisten mempunyai persentase pengeluaran terendah.

Mengenai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah, angka-angka di Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Laos berfluktuasi dan menunjukkan tren menurun sepanjang periode tersebut. Kamboja



dan Malaysia mengalami peningkatan persentase total belanja paling besar. Sebaliknya, Singapura dan Laos mengalami penurunan belanja pendidikan yang paling signifikan dalam persentase terhadap PDB.

Hanya Malaysia yang memenuhi standar ini ketika membandingkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dengan ambang batas yang direkomendasikan UNESCO sebesar 4% dari PDB. Meskipun lebih dari separuh negara-negara ASEAN memenuhi rekomendasi total belanja publik minimum UNESCO, banyak negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang tidak memenuhi standar negara mereka sendiri.

Di ASEAN, sebagian besar belanja pemerintah untuk pendidikan bersifat berulang. Namun, pola belanja rutin dan belanja modal berbeda-beda di setiap wilayah. Negara-negara kecil mengalokasikan belanja modal yang jauh lebih tinggi, sementara negara-negara berpendapatan tinggi menunjukkan belanja modal yang kecil.

Sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, sebagian besar pemerintah memotong anggaran pendidikan mereka dan mengalihkannya ke tindakan yang lebih mendesak, kecuali Malaysia dan Indonesia. Singapura mengalami pengurangan belanja paling signifikan sejak awal pandemi.

Di sebagian besar negara ASEAN, persentase pendaftaran di sekolah swasta cenderung meningkat, kecuali Kamboja, Filipina, dan Thailand. Tren ini mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap pendidikan swasta di seluruh wilayah, yang menunjukkan kemungkinan adanya kekurangan dalam pendidikan pemerintah, karena pemotongan belanja pemerintah. Dua faktor utama yang dapat mendorong tren ini: siswa dan orang tua mereka mencari lingkungan belajar yang lebih personal, modern, dan internasional, dan sekolah negeri sering kali penuh sesak, sehingga mendorong beberapa siswa untuk mencari pilihan alternatif. Meskipun meningkatnya jumlah pendidikan swasta memperluas peluang bagi anak-anak, hal ini juga menimbulkan tantangan dan kekhawatiran, terutama terkait pendanaan, keterjangkauan, dan jaminan kualitas.

Dalam hal dampak belanja publik termasuk pendidikan, semua negara ASEAN berada di posisi paruh bawah Indeks Komitmen Mengurangi Ketimpangan (CRII-*Commitment to Reducing Inequality Index*). Dalam hal CRII untuk cakupan pendidikan, Myanmar, Kamboja, dan Laos adalah tiga negara ASEAN yang paling tidak berkembang, dan termasuk yang terendah secara global. Sebaliknya, Singapura, Malaysia, dan Filipina mendapat nilai tertinggi pada indikator ini. Kesenjangan dalam mengakses pendidikan antar gender, lokasi, dan tingkat kekayaan semakin menyempit. Namun kesenjangan masih terjadi di antara kelompok masyarakat termiskin, terutama di Laos dan Indonesia. Terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki persentase institusi pendidikan swasta tertinggi, dan Laos menunjukkan tingkat pertumbuhan sekolah swasta paling signifikan.

Negara-negara ASEAN berupaya meningkatkan hasil pendidikan, sebagaimana dibuktikan dengan nilai PISA mereka. Namun, sebagian besar negara, kecuali Singapura, masih mendapat skor lebih rendah dibandingkan rata-rata OECD. Demikian pula, meskipun

Singapura dan Brunei termasuk negara-negara dengan pembangunan manusia yang sangat tinggi, negara-negara ASEAN lainnya memiliki skor HDI di bawah rata-rata regional ASEAN. Namun, skor IPM suatu negara cenderung meningkat.

Meningkatkan prestasi akademik dan memastikan akses yang lebih adil terhadap pendidikan memerlukan peningkatan pengeluaran untuk pendidikan. Namun, negara-negara ASEAN menghadapi banyak tantangan dalam memobilisasi sumber daya domestik untuk pendidikan, termasuk rendahnya progresivitas pajak, kendala ekonomi, terbatasnya dukungan kebijakan untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.

6.2. Rekomendasi

Memaksimalkan mobilisasi sumber daya dalam negeri untuk pendidikan di negara-negara ASEAN penting untuk mengurangi kesenjangan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Peningkatan investasi di bidang pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas karyawan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan inovasi. Selain itu, dengan berfokus pada mobilisasi sumber daya dalam negeri, negara-negara ASEAN dapat mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal yang tidak stabil, sehingga memastikan investasi di bidang pendidikan lebih stabil dan dapat diprediksi. Pendekatan ini juga memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan lokal, mendorong inklusivitas, dan mengatasi tantangan sosio-ekonomi spesifik yang unik di setiap negara. Oleh karena itu, peningkatan investasi pendidikan memungkinkan negara-negara ASEAN membuka jalan bagi pembangunan yang adil dan struktur ekonomi yang tangguh yang bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Mengingat tantangan-tantangan di atas, laporan ini merekomendasikan agar negara-negara ASEAN mengambil tindakan berikut.

Rekomendasi 1: Meningkatkan dan menjamin pembiayaan pendidikan di semua tingkatan

Pemerintah di negara-negara ASEAN perlu memfokuskan anggaran mereka pada sektor pendidikan; hal ini dapat direalokasikan dari anggaran mitigasi COVID-19 yang kini sudah mulai pulih. Hal yang juga memprihatinkan adalah bahwa Laos mempunyai tren penurunan pengeluaran anggaran untuk pendidikan sebagai persentase terhadap PDB. Negara-negara ASEAN harus sepakat untuk meningkatkan atau mempertahankan porsi belanja publik di bidang pendidikan terhadap tolok ukur internasional minimal 4-6% PDB atau 15-20% dari rekomendasi belanja publik UNESCO. Dengan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan sumber daya siswa, sehingga meningkatkan peluang bagi individu yang berpendidikan lebih baik untuk berpartisipasi secara efektif dalam perekonomian. Peningkatan hasil pendidikan juga meningkatkan pendapatan individu, yang berarti peningkatan pendapatan pajak.

Rekomendasi 2: Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pembiayaan pendidikan yang tidak adil

ASEAN harus menetapkan formula pendanaan yang transparan dan adil yang menjamin pemerataan distribusi di seluruh wilayah dan sekolah. Formula ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesenjangan regional, kebutuhan siswa, dan status sosial ekonomi. Selain itu, penting untuk menerapkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kuat untuk memastikan dana digunakan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola sekolah juga dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan lokal terpenuhi dan sumber daya dikelola dengan tepat. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem dan memfasilitasi mobilisasi sumber daya yang lebih besar untuk pendidikan.

Rekomendasi 3: Menjamin tersedianya laporan dan data perbandingan mengenai perkembangan pendidikan di setiap negara ASEAN

Negara-negara ASEAN memerlukan standar pelaporan data pendidikan yang seragam untuk meningkatkan pengelolaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Standar ini akan memfasilitasi pemantauan dan penilaian komitmen dan alokasi anggaran setiap negara untuk sektor pendidikan. Informasi penting yang harus selalu diperbarui mencakup tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah, jumlah sekolah negeri dan swasta, dan jumlah siswa yang terdaftar. Pentingnya ketersediaan dan pembagian data antar negara memungkinkan adanya standar yang konsisten di seluruh kawasan. Standardisasi ini mencakup beberapa aspek penting seperti format data, bidang data yang relevan, keamanan dan penyimpanan data, aksesibilitas dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan data, serta standar teknis yang mendukung keseragaman format dan konten data. Melalui kerangka ini, ASEAN dapat menyelaraskan pendekatannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan di seluruh kawasan.



Daftar Pustaka

- Alexander, K. L., & Pallas, A. M. (1983). Private schools and public policy: New evidence on cognitive achievement in public and private schools. *Sociology of Education*, 170–183.
- BTAP, CDI, & VESS. (2023). *Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh POBI 2022—Đo lường mức độ công khai thông tin ngân sách địa phương [Viet Nam’s Provincial Open Budget Index Report (POBI) 2022—Measure the Extent of Provincial’ Budget Disclosure]*. VESS.
- Dabrowski, A., Conway, M., Nietschke, Y., Berry, A., & Pradhika, C. Y. (2022). Covid-19 Education Response Mapping Study—Building Resilience in the Philippines: Readiness, Response, and Recovery. In *COVID-19 Education Response Mapping Study in Asia: Executive summary* (p. 122). United States Agency for International Development. <https://doi.org/10.37517/978-1-74286-701-4>
- Đặng Nguyên. (2018, April 7). Trường “ma” liên kết dạy ở VN? [Does schools in Vietnam have partnership with ‘ghost’ schools]. *thanhnien.vn*. <https://thanhnien.vn/truong-ma-lien-ket-day-o-vn-185746989.htm>
- Department of Education, Skills and Employment. (2021). *Thailand Education Policy Update-School Sector*. Australian Government.
- DFI & Oxfam. (2022). *The Commitment to Reducing Inequality Index 2022*.
- Glewwe, P., & Patrinos, H. A. (1998). *The Role of the Private Sector in Education in Vietnam: Evidence from the Vietnam Living Standards Survey (132; LSMS Working Paper)*. World Bank.
- Khánh An. (2023, July 18). Mức chênh lệch học phí trường công—Trường tư năm học 2023-2024 ở Hà Nội [The difference in public and private school tuition for the 2023-2024 school year in Hanoi]. *Báo Lao Động*. <https://laodong.vn/giao-duc/muc-chenh-lech-hoc-phi-truong-cong-truong-tu-nam-hoc-2023-2024-o-ha-noi-1218180.ldo>
- Lao PDR MoES & UNICEF Lao PDR. (2022). *SEA-PLM 2019 Regional Assessment Results: Lao PDR Country Report*.
- Lao PDR MoES, UNICEF, & Save the Children. (2021). *Lao PDR Education COVID-19 Response Plan*.
- MoEYS. (2020). *Cambodia Education Response Plan to COVID 19 Pandemic*.
- MoEYS. (2021). *Education in Cambodia: Results from Participation in the SEA-PLM*.
- OECD. (2020). *PISA 2018 Results (Volume V): Effective Policies, Successful Schools*. OECD. <https://doi.org/10.1787/ca768d40-en>
- OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Parajuli, D., Dung Kieu Vo, Salmi, J., & Nguyen Thi Anh Tran. (2020). *Improving The Performance Of Higher Education In Vietnam: Strategic Priorities and Policy Options*. World Bank.



- Perkumpulan PRAKARSA. (2024). Assessing The Incentives Policies for Foreign Investment in ASEAN Member States 2021-2023. Perkumpulan PRAKARSA.
- Philippines Department of Education & UNICEF Philippines. (2021). Southeast Asia Primary Learning Metrics 2019: National Report of the Philippines.
- Trinh Ngoc Thach. (2019). Chính sách ưu tiên đầu tư tài chính cho giáo dục của Việt Nam theo quan điểm “phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”.pdf. Proceedings of 1st International Conference on Innovation of Teacher Education: Twenty Years of Development: A Model for Inner-Institutional Teacher Training, Ha Noi.
- UNDP (2024). Human Development Reports 2023 - 2024.
- UNDP (2014). Human Development Report 2014.
- UNESCO. (2016). Unpacking Sustainable Development Goal 4: Education 2030.
- UNESCO Bangkok. (2014). 2014 Education Systems in ASEAN+6 Countries: A Comparative Analysis of Selected Educational Issues.pdf (No. 5; Education Policy Research Series Discussion Document). UNESCO.
- Vandeweyer, M., Espinoza, R., Reznikova, L., Lee, M., & Herabat, T. (2021). Thailand's Education System and Skills Imbalances: Assessment and Policy Recommendations (No. 1641; Economics Department Working). OECD.
- VEPR, Oxfam in Vietnam, The PRAKARSA, & TAFJA. (2020). Towards Sustainable Tax Policies in the ASEAN Region: The Case of Corporate Tax Incentives.
- Vu Sy Cuong. (2020). Phân tích cơ cấu chi ngân sách địa phương cho giáo dục [An analysis of local budget spending structure on education]. Tạp Chí Tài Chính, 2(12).



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies


The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, sebuah "*think tank*" yang berbasis organisasi masyarakat sipil. The PRAKARSA didirikan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui pengembangan ide, reformasi kebijakan dan institusi, serta inovasi pemecahan masalah berbasis bukti. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Kami melakukan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pelatihan di berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, kami secara konsisten mengadopsi pendekatan kolaboratif dan engagement untuk bekerja sama dengan berbagai pihak: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, lembaga donor pembangunan, dan media massa.





Kami percaya bahwa pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat karya dan inisiatif kami dalam produksi dan penyebaran pengetahuan serta proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kami juga percaya bahwa jaringan akan memfasilitasi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, kami telah menerima dukungan dari berbagai donor dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama mitra The PRAKARSA.

www.theprakarsa.org

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast